

TESIS

**ANALISIS DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**



Disusun oleh:

RIZKI LINDA ASFIKA

21919026

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

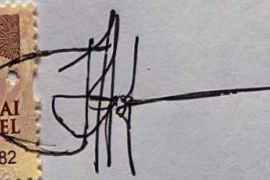
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

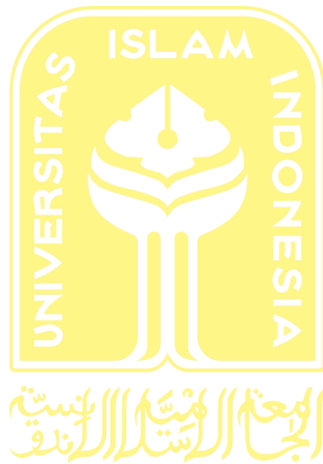
“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pascasarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 30 Desember 2024




Rizki Linda Afiska

LEMBAR PENGESAHAN



Yogyakarta, 30 Desember 2024

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh

: Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Ayu Chairina', is written over a horizontal line.

Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom.,M.Res., Ph.D.,Ak.,CA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

RIZKI LINDA AFISKA

No. Mhs. : 21919026

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Dengan Judul:

ANALISIS DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji, maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA.

Penguji II



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.

Mengetahui Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., A.P., M.Com., Ph.D.

MOTTO

“AND ALLAH IS THE BEST PLANNERS”

-Qur'an Ali Imran: 54-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai variabel Intervening”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Penyusunan penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Alhamdulillah penelitian ini dapat terselesaikan meskipun masih banyak kekurangan. Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dan selalu dalam lindungan-Nya, serta semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Aamiin ya rabbal 'alaamiin.*

Yogyakarta, November 2024

Rizki Linda Afiska

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	14
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	16
2.3 Dana Perimbangan	18
2.4 Dana Otonomi Khusus	18
2.5 Pendapatan Asli Daerah	20
2.6 Belanja Modal	20
2.7 Penelitian Terdahulu.....	22
2.8 Pengembangan Hipotesis	32

2.9 Kerangka Konseptual	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Populasi dan Sampel	47
3.2 Metode Pengumpulan Data	48
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	48
3.4 Metode Analisis Data	52
3.4.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi.....	53
3.4.2 Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel	54
3.4.2.1 Uji Chow	54
3.4.2.2 Uji Hausman.....	55
3.4.2.3 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	55
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	56
3.4.3.1 Uji Multikolinearitas	57
3.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas	57
3.4.4 Pengujian Hipotesis	58
3.4.4.1 Uji t.....	58
3.4.4.2 Uji F.....	58
3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi.....	59
3.4.5 Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	62
4.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.....	62
4.1.1 Provinsi Aceh.....	62
4.1.2 Provinsi Papua	62
4.1.3 Provinsi Papua Barat.....	63
4.2 Statistik Deskriptif.....	64
4.3 Estimasi Model Regresi Data Panel	66
4.3.1 Uji Substruktural I	67
4.3.2 Uji Substruktural II	68
4.4 Uji Asumsi Klasik	68
4.4.1 Uji Multikolinearitas.....	69
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas	69
4.5 Uji Hipotesis.....	70
4.5.1 Uji t.....	70
4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F-Statistik)	72
4.5.3 Uji <i>R Square</i> (Koefisien Determinasi)	73
4.6 Uji Sobel.....	73
4.7 Pembahasan	75

BAB V PENUTUP.....	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Implikasi Penelitian.....	97
5.3 Keterbatasan	99
5.4 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	52
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif	64
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow Model Sub Struktural I	67
Tabel 4. 3 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	67
Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow Model Sub Struktural II.....	68
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model substruktural I.....	69
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model substruktural II	69
Tabel 4. 8 Hasil Perbaikan Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4. 9 Hasil Uji t Model Substruktural I dan II	71
Tabel 4. 10 Hasil Uji F Statistik	72
Tabel 4. 11 Hasil Uji R Square	73
Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Hipotesis	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Prinsipal dan Agen di Pemerintahan.....	15
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual.....	46
Gambar 3.1 Persamaan Jalur	59

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari dana perimbangan, dana otonomi khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh tiga sampel yaitu Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel dan analisis jalur (path analysis). Hasil pengujian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan dana otonomi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Adapun secara langsung dana perimbangan, dana otonomi khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis jalur menemukan hasil bahwa belanja modal tidak memediasi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi; dana perimbangan; dana otonomi khusus; Pendapatan Asli Daerah; belanja modal

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of balancing funds, special autonomy funds and local original income on economic growth with capital expenditure as an intervening variable. The sample was selected using purposive sampling, resulting in three provinces: Aceh, Papua, and West Papua. The analysis method in this research uses panel data regression analysis models and path analysis. The research results found that balancing funds and local original income had no effect on capital expenditure, while special autonomy funds had a significant positive effect on capital expenditure. Meanwhile, balancing funds, special autonomy funds and local original income have a significant positive effect on economic growth directly, while capital expenditures have no effect on economic growth. The results of the path analysis found that capital expenditure did not mediate balancing funds, special autonomy funds, and local original income on economic growth.

Keyword: *Economic growth, balancing funds, special autonomy funds, local original income, capital expenditure*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian dunia mengalami kontraksi hebat selama tahun 2020 akibat pandemic Covid-19 karena gangguan besar pada aktivitas ekonomi global (Băhnăreanu, 2020). Sebagai bukti, kontraksi ekonomi global yang diperkirakan oleh IMF adalah sebesar -4,9% *yoy* (WEO Juni) di tahun 2020, bahkan prakiraan awal musim semi oleh IMF dan lembaga pemeringkat ternama memperkirakan kontraksi hingga setidaknya 3,3% yang jauh melampaui krisis ekonomi makro 2008–2009, menjadikannya salah satu resesi terparah dalam sejarah modern (BI, 2020; Krstic dkk., 2020). Tidak hanya itu, di tahun 2023, perekonomian global masih merasakan dampak pandemi Covid-19. Ini dibuktikan di tahun 2023 pertumbuhan global diperkirakan melambat dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3,0% pada tahun 2023 dan 2,9% pada tahun 2024. Proyeksi tersebut tetap di bawah rata-rata historis (2000–19) sebesar 3,8%, dan perkiraan untuk tahun 2024 turun 0,1 poin persentase dari pembaruan *World Economic Outlook* bulan Juli 2023 (IMF, 2023). Dengan demikian, pengaruh pandemi Covid-19 pada ekonomi global tidak saja pada saat pandemi berlangsung tetapi juga pasca tragedi pandemi terjadi.

Di Indonesia, pemulihan ekonomi terus berlanjut sejak kontraksi besar yang terjadi pada tahun 2020 (Muhyiddin & Nugroho, 2021). Lebih dari itu, Sri Mulyani sebagai menteri keuangan Republik Indonesia mengungkapkan

bahwa meskipun ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,07% di tahun 2020, tetapi tidak lebih besar dari negara-negara G20 lainnya yang rata-rata mengalami kontraksi sebesar -4,7% (Novelino, 2021). Pada tahun 2021 berdasarkan data dari BPS, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 3,69 % di tengah negara-negara lainnya sedang melakukan pemulihan ekonomi. Menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 5,2%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,9% pada tahun 2023-2025 (Hasudungan dkk., 2023). Meskipun berbagai literatur mencatat demikian, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh daerah/provinsi menjadi persoalan yang lain dan menjadi tantangan tersendiri di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pasca pandemi Covid-19 terdapat beberapa daerah di Indonesia yang laju pertumbuhan ekonominya masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 namun mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya, seperti Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat (BPS Papua Barat, 2023; BPS Provinsi Aceh, 2023). Sebagai bukti, di Aceh mengalami kontraksi sebesar -1,89% pada Triwulan I 2021. Selama tahun 2021, ekonomi Aceh secara bertahap pulih, mencapai puncaknya dengan pertumbuhan 2,79% pada Triwulan IV. Pemulihan ini berlanjut ke tahun 2022 dengan pertumbuhan yang tetap positif, meskipun ada sedikit penurunan di beberapa triwulan, seperti pada Triwulan III yang mencatat 2,13% (BPS Provinsi Aceh, 2023). Memasuki tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Aceh tetap stabil dengan angka 4,63% pada Triwulan I

dan 4,37% hingga Triwulan II, mencerminkan stabilitas ekonomi yang terus berlanjut (BPS Provinsi Aceh, 2023). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir (BPS Papua Barat, 2023). Pada tahun 2019, ekonomi tumbuh sebesar 2,66%, namun mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sebesar -0,76%. Kontraksi ini berlanjut pada tahun 2021 dengan pertumbuhan negatif -0,51%. Memasuki tahun 2022, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan positif sebesar 2,01%, dan pada tahun 2023, pertumbuhan semakin menguat hingga mencapai 5,18% (BPS Papua Barat, 2023), menandakan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di Papua Barat.

Hal yang berbeda yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi Papua yang menunjukkan pertumbuhan signifikan sejak 2021 di tengah ekonomi Indonesia dalam proses pemulihan pasca Covid-19. Merujuk pada data BPS Papua 2021-2023, ekonomi Papua menunjukkan pertumbuhan yang dinamis selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sangat tinggi, mencapai 15,11% (year-on-year) (BPS Provinsi Papua, 2023). Namun, pada tahun 2022, laju pertumbuhan sedikit melambat tetapi tetap positif di angka 8,97% (BPS Provinsi Papua, 2023). Kemudian, pada tahun 2023, ekonomi Papua kembali mengalami penurunan di angka 5,22% (BPS Provinsi Papua, 2023). Meskipun Papua mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, begitu pun dengan Aceh dan Papua Barat, nyatanya realitas sosial-ekonomi di daerah-daerah tersebut masih menunjukkan tantangan besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

Maret 2023, Papua tetap menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan angka kemiskinan mencapai 26,03%. Provinsi Papua Barat juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi sebesar 20,49%, diikuti oleh NTT dengan 19,96%, Maluku dengan 16,42%, dan Aceh dengan 14,45% (BPS Papua Barat, 2023; BPS Provinsi Aceh, 2023; BPS Provinsi Papua, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada pertumbuhan ekonomi yang positif, banyak daerah di Indonesia, khususnya di wilayah timur, masih bergelut dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Fenomena di atas semakin mengkhawatirkan bila ditinjau melalui pengalokasian dana transfer yang diberikan bagi seluruh provinsi di Indonesia. Pasalnya, terdapat tiga provinsi yang termasuk ke dalam provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan provinsi penerima dana otonomi khusus. Adapun Provinsi Papua dan Papua Barat penerimaan dana otsus akan berakhir di tahun 2021 namun kondisi tingkat kesejahteraan dan akses masyarakat pada pelayanan publik, di kedua provinsi penerima dana otsus tersebut relatif masih tertinggal bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia (Pattinasarany et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi yang seharusnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meminimalisir kemiskinan, nyatanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah ini tidak secara otomatis meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengindikasikan bahwa ada masalah yang signifikan antara alokasi dana dan hasil yang diperoleh. Sebagai contoh, meskipun dana otsus terus meningkat, angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat tetap tertinggi di Indonesia, menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak merata dan tidak inklusif. Fakta ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam pengelolaan dana otsus dan dana perimbangan, di mana alokasi yang besar belum mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan wilayah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga merupakan salah satu target utama pembangunan dalam rencana pembangunan wilayah di samping pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi juga sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sjafrizal, 2008). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi memiliki potensi untuk meningkatkan kekayaan suatu negara dan sekaligus dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta mengatasi berbagai permasalahan sosial lainnya (Hidayat, 2017).

Keadaan ekonomi yang cenderung belum stabil membuat pemerintah daerah harus lebih bekerja keras demi menaikkan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dapat pemerintah lakukan adalah optimalisasi sumber keuangan daerah. Sumber keuangan daerah salah satunya adalah Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang “Dana

Perimbangan”, menyebutkan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintahan daerah.

Selain dana perimbangan yang diberikan untuk seluruh wilayah di Indonesia sebagai bentuk dukungan guna mengurangi kesenjangan ekonomi, pemerintah Indonesia menggelontarkan dana otonomi khusus yang hanya di berikan kepada tiga provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Papua Barat. Dana otsus sendiri ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Otonomi Khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002 berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kemudian untuk Provinsi Papua Barat pemberlakuan otonomi khusus diberikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Pada tahun 2021, DPR RI sepakat untuk tetap melanjutkan pemberian dana otsus bagi Papua yang seharusnya berakhir pada tahun 2021 dan diperpanjang hingga tahun 2041. Keputusan ini didasari oleh perekonomian Papua yang belum dapat dikatakan cukup baik. Jika Papua mendapatkan perpanjangan 20 tahun ke

depan, maka hal yang sama belum bisa didapatkan oleh Provinsi Aceh. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, 15 tahun pertama besaran dana otsus yang diperoleh adalah 2% dari DAU dan 5 tahun terakhir menjadi 1%. Hal ini berarti tahun 2023 besaran dana otsus yang diperoleh Provinsi Aceh bukan lagi 2% melainkan menjadi 1% dan akan berakhir pada tahun 2027. Bersama dengan dana perimbangan, dana otsus diharapkan dapat menjadi sumber dana tambahan demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang lebih baik bagi Papua dan Aceh.

Walaupun memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain, Aceh dan Papua berada pada 10 provinsi dengan Pendapatan Daerah terbesar di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, APBD provinsi terbesar di Indonesia 2021 adalah APBD DKI Jakarta, Papua berada pada peringkat 5 dan Aceh peringkat 6. Besarnya pendapatan daerah yang diperoleh Aceh dan Papua ini akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi perekonomian daerah jika dikelola secara optimal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Besarnya sumber keuangan suatu daerah tidak akan dirasakan oleh masyarakat jika tidak dikelola dengan benar. Salah satu optimalisasi pengelolaan dana yang diperoleh daerah dapat disalurkan dalam bentuk belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dalam hal ini, dana perimbangan dan dana otonomi khusus serta Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh perlu dialokasikan lebih khusus pada belanja modal karena secara tidak langsung alokasi belanja modal pada infrastruktur penunjang pelayanan publik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan konsep yang telah dibahas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi belanja modal. Hal ini didukung oleh

penelitian Muttaqin dkk, (2021), Silviani dan Adiputra (2023) dan Wiraswasta dkk, (2018) yang mengemukakan bahwa dana perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Akan tetapi, berbeda dari penelitian sebelumnya Zulkarnain dan Haryati (2023) menemukan hasil yang sebaliknya yaitu dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Tujuan diberikannya dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mana salah satu programnya adalah peningkatan infrastruktur. Berdasarkan tujuannya, pengalokasian dana otonomi khusus sudah seharusnya dapat meningkatkan porsi belanja modal di daerah. Penelitian Wanma dkk, (2021) dan Abdullah dkk, (2020) menemukan hasil bahwa dana otonomi khusus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian Zulkarnain dan Haryati (2023) juga menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal. Besaran PAD yang peroleh daerah dapat mengindikasikan kemandirian daerah, karena dengan PAD yang cukup dan memadai akan menurunkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Salah satu pengalokasian PAD adalah untuk mendanai belanja modal pemerintah daerah yang meliputi belanja infrastruktur dan peralatan. Hasil yang sama juga diperoleh oleh penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2020) dan Muttaqin dkk (2021).

Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik digunakan sebagai dasar penganggaran belanja modal. Maka dari itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah perlu mengubah komposisi belanjanya. Pengelolaan APBD untuk pengeluaran daerah yang dialokasikan pada sektor pembangunan akan mendorong pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Yuliani, 2019). Penyebaran pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas juga dapat memastikan pertumbuhan ekonomi menyebar sampai ke penjuru negeri (Waryanto, 2017). Oleh sebab itu, pemerintah harus meningkatkan porsi investasi publik dengan harapan bahwa langkah-langkah ini kemungkinan akan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan panjang (Divino dkk, 2020).

Penelitian ini mengembangkan konsep sebelumnya menjadi pengaruh dana otonomi khusus, dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Dalam penelitian sebelumnya, penelitian terbatas hanya pada pengaruh dana perimbangan, dana otonomi khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal dan pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jika ditinjau lebih lanjut, alokasi dana perimbangan dan dana otonomi khusus serta Pendapatan Asli Daerah tidak hanya mempengaruhi belanja modal akan tetapi juga secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan,

dana otonomi khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal?
2. Adakah pengaruh dana otonomi khusus terhadap belanja modal?
3. Adakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal?
4. Adakah pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi?
5. Adakah pengaruh dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi?
6. Adakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi?
7. Adakah pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi?
8. Adakah pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal?
9. Adakah pengaruh dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal?
10. Adakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal
2. Untuk menganalisis pengaruh dana otonomi khusus terhadap belanja modal

3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal
4. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi
5. Untuk menganalisis pengaruh dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi
6. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
7. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.
9. Untuk menganalisis pengaruh dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.
10. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi sehubungan dengan sumber keuangan daerah dan perannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber keuangan daerah guna menaikkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi landasan teori yang digunakan pada penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel penelitian, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi metode penelitian yang digunakan. Kemudian informasi mengenai populasi dan sampel penelitian, pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV berisi gambaran secara umum objek penelitian, hasil dari pengolahan data dan pembahasan dari pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

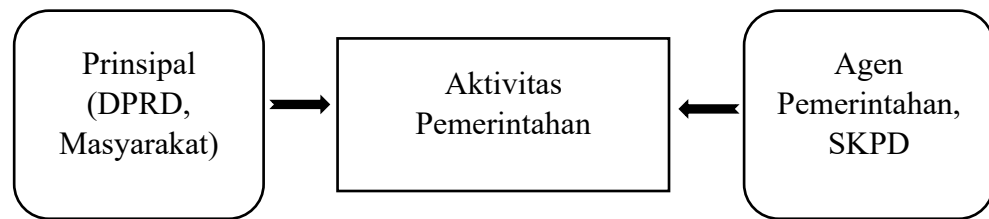
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas yang mengandalkan pada kontrak, baik eksplisit ataupun implisit, sebagai acuan pranata perilaku partisipan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hubungan keagenan terjadi pada setiap entitas tidak terkecuali entitas pemerintahan. Entitas pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada seperangkat aturan yang menspesifikasikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap partisipan. Walaupun cara kerja dan mekanisme hubungan antar partisipan dalam organisasi pemerintah berbeda dengan sektor korporasi, adanya ikatan formal tersebut menunjukkan adanya kontrak dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Hal ini memberikan justifikasi bahwa terdapat hubungan keagenan dalam organisasi pemerintahan di Indonesia (Supriadi, 2020).

Hubungan agen dan prinsipal dapat terjadi pada organisasi pemerintahan baik tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah (Rahayu & Yudi, 2022). Adapun hubungan prinsipal dan agen dalam pemerintahan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Hubungan Prinsipal dan Agen di Pemerintahan

Pada ilustrasi gambar di atas, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah menjadi agen. Sedangkan masyarakat, DPR atau DPRD sebagai wakil masyarakat berada pada posisi *principal*. Adapun DPRD bisa juga berada pada posisi agen dalam hubungannya dengan masyarakat karena menerima amanah dari masyarakat (Rahayu & Yudi, 2022).

Mengacu pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, partisipan pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga bupati atau walikota, dan DPRD. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa bupati dan walikota bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pemerintah. Selanjutnya, dinyatakan bahwa bupati dan walikota dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pertanda adanya pelimpahan wewenang dari rakyat kepada bupati dan walikota. Fakta adanya pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang kepada bupati dan walikota menunjukkan bahwa bupati dan walikota berperan sebagai agen dan rakyat merupakan prinsipal dalam hubungan keagenan.

Secara singkat, hubungan keagenan dalam pemerintahan dapat dilihat dari peran masyarakat dalam era demokrasi ini sebagai pemilik kedaulatan. Kemudian pemerintah daerah adalah pihak yang dipilih dan dipercaya oleh

rakyat untuk melaksanakan kedaulatan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah. Sedangkan fungsi mengatur dan menyusun anggaran dipercayakan kepada DPRD melalui mekanisme pemilihan wakil rakyat. Antara kepala daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan mitra kerja dengan fungsi dan peran yang berbeda, yang keduanya merupakan satu kesatuan dalam menjalankan pemerintahan daerah (Dailibas et al., 2020).

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk, karena seringkali tingkat pertumbuhan penduduk dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah bertambahnya pendapatan nasional dalam periode waktu tertentu misalnya dalam satu tahun terakhir yang terlihat dari meningkatnya kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi merupakan proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat (Rapanna & Sukarno, 2017). Mengukur kondisi ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pergerakan Produk Domestik Bruto (PDB). Perekonomian daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu

periode. Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah.

Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang dapat dijadikan sebagai parameter, salah satunya adalah teori pertumbuhan ekonomi Keynesian. Secara garis besar, teori Keynes berfokus pada upaya pemerintah negara bersangkutan dalam menjaga kestabilan ekonomi dan menekankan bentuk penstabilan ekonomi negara pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Keynes menyebutkan bahwa untuk menghindari dan menangani terjadinya krisis maka pemerintah perlu melakukan suatu bentuk investasi dalam bentuk fasilitas publik. Namun, hal ini perlu dibarengi dengan peningkatan konsumsi secepat proses produksi yang akan menimbulkan krisis perekonomian yang kemudian hubungan antara investasi dan konsumsi ini digambarkan dalam model ekonomi yang keduanya berakar dari pendapatan (Rahmadana dkk., 2021). Selanjutnya, teori Neo-Keynes yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Aspek utama yang pengembangan teori ini adalah hubungan antara tabungan, investasi dan pendapatan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, investasi dalam jangka panjang akan menambah modal dan selanjutnya kapasitas produksi (output) masyarakat juga akan meningkat.

2.3 Dana Perimbangan

Otonomi daerah merupakan salah satu agenda reformasi yang digunakan untuk mengurangi berbagai gejala yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan antar daerah. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 yang mengatur tentang kebijakan desentralisasi fiskal melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dengan harapan akan menciptakan keadilan antar daerah serta pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dikurangi.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang disebut dana perimbangan sebagaimana tercantum dalam UU No 33 tahun 2004 terdiri dari bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan perorangan, penerimaan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.4 Dana Otonomi Khusus

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), beberapa daerah di Indonesia mendapatkan keistimewaan mendapatkan alokasi dana khusus. Tiga provinsi yang mendapat dana Otonomi Khusus adalah Papua Barat, Papua, dan Aceh. Otonomi Khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002 berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kemudian untuk Provinsi Papua Barat pemberlakuan otonomi khusus diberikan melalui Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Besaran dana tambahan infrastruktur ini disepakati antara Pemerintah dengan DPR, dan penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; yang masing-masing minimal 30% (tiga puluh persen) dan 15% (lima belas persen).

Pengalokasian dana otonomi khusus untuk provinsi Aceh dilaksanakan mulai tahun 2008, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana otsus tersebut dialokasikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas, yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh, besarnya setara dengan 1% (satu persen) dari plafon DAU nasional.

Provinsi Papua Barat menjadi provinsi terakhir yang menerima Dana Otonomi Khusus. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat sendiri mulai diberlakukan semenjak diterbitkannya UU No. 1/2008 tentang Penetapan Perpu No. 1/2008 tentang perubahan atas UU No. 21/2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Sebagai daerah otonomi khusus yang terpisah dari Papua, Papua Barat hanya menerima sepertiga dana yang dialokasikan untuk keseluruhan tanah Papua.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Wulandari dan Emy (2018), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sumber-sumber dalam wilayahnya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.6 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/ karakteristik berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya relatif material.

Peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik sebagai akses distribusi faktor-faktor produksi dan modal untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah sangat diperlukan. Pengelolaan APBD untuk pengeluaran daerah yang didistribusikan pada sektor-sektor pembangunan akan mendorong pembangunan daerah yang nantinya juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Yuliani, 2019).

Di sebagian besar perekonomian, sebagian besar pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk barang publik yang sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas sosial ekonomi. Pengeluaran pemerintah juga merupakan sumber lapangan kerja yang penting bagi perekonomian. Peningkatan investasi dan perbaikan dalam barang dan jasa publik berpotensi untuk memperbaiki lingkungan ekonomi yang akan memiliki efek *'knock-on'* pada iklim investasi,

kegiatan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi (Arvin dkk, 2021). Dalam literatur pertumbuhan ekonomi, pergeseran pengeluaran pemerintah dari pengeluaran pemerintah non-produktif atau menghambat pertumbuhan menuju pengeluaran produktif atau peningkatan pertumbuhan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan itu, belanja modal pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Selvanathan dkk, 2021).

2.7 Penelitian Terdahulu

Keberhasilan sebuah penelitian dimulai dengan menemukan definisi yang jelas dari masalah yang akan diteliti. Salah satu caranya adalah dengan melakukan telaah kajian pustaka untuk membantu mengumpulkan ide-ide yang mendukung fakta-fakta dalam penelitian guna memperoleh informasi tentang hasil temuan lain yang memiliki kesamaan atau hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan (Fitrah & Luthfiah, 2017). Kajian Pustaka merupakan kegiatan untuk mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang akan mengarahkan pada pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Melakukan kajian pustaka juga akan membantu penulis untuk menggali ide, teori, konsep maupun metode yang akan menambah wawasan bagi para peneliti serta untuk menghindari tindak plagiasi (Fitrah & Luthfiah, 2017). Pada penelitian ini, tema yang diangkat adalah analisis pengaruh dana otonomi khusus, dana perimbangan dan

Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara dapat disebut mengalami kenaikan ekonomi jika terdapat peningkatan GNP riil di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (Rapanna & Sukarno, 2017).

Menurut Rapanna dan Sukarno (2017), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu,

misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisis guna keberhasilan penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi yang ambil oleh pemerintah.

Dari pembahasan di atas, berikut adalah rangkuman beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel	Populasi, Sampel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jikwa dkk., (2017)	Dependen: Belanja Modal Independen: DAU, DAK, DBH, DOK, SiLPA	Populasi dan sampel: - Metode: Regresi linier berganda (OLS)	- Dana transfer pemerintah pusat melalui sumber dana DBH, DAU, DAK dan OTSUS memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal - SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal
2	Lisandri dkk (2017)	Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Independen: PAD dan Dana Alokasi Umum Intervening: Belanja Modal	Populasi: Pemerintahan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan Sampel: 13 kabupaten dan kota Metode: <i>Path Analysis</i>	- PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja modal - DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal - PAD tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi - DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal - Dau berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal
3	Waryanto, (2017)	Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Independen: Belanja Modal dan Belanja Operasi Variabel Kontrol: Inflasi	Populasi: Seluruh satuan kerja pemerintah pusat di Indonesia tahun 1990-2014 Sampel: Semua anggota populasi Metode: Regresi Linier Berganda	- Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Belanja operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Inflasi sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan independen

4	Anwar dkk., (2018)	<p>Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)</p> <p>Independen: Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Otonomi Khusus (X2) dan Belanja Modal (X3)</p>	<p>Populasi: 28 Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua</p> <p>Sampel: Seluruh jumlah populasi</p> <p>Metode: Model <i>common effect, fixed effect</i> dan <i>random effect</i>, uji chow dan hausman, kemudian uji t, uji f dan koefisien determinasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
5	Wiraswasta dkk, (2018)	<p>Dependen: Pertumbuhan ekonomi</p> <p>Independen: Dana Perimbangan dan PAD</p> <p>Intervening: Belanja Modal</p>	<p>Populasi: Keseluruhan laporan keuangan daerah di Kota yang ada di Wilayah Jawa Timur (kecuali Kota Surabaya) pasca era otonomi daerah</p> <p>Sampel: 8 Kota Di Jawa Timur periode tahun 2009-2014</p> <p>Metode: Regresi berganda dan analisis jalur (<i>path analysis</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal - PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal - Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal - PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.
6	Abel dkk., (2019)	<p>Dependen: <i>Economic Growth</i></p> <p>Independen: <i>Government capital expenditure dan Recurrent expenditure</i></p>	<p>Populasi dan Sampel: Data time series Ghana dari tahun 1980-2017</p> <p>Metode Penelitian: Estimasi Stock-Watson Dynamic OLS dan Granger Causality test</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Government capital expenditure</i> berpengaruh positif terhadap <i>Economic Growth</i> di Ghana. - <i>Recurrent expenditure</i> berpengaruh negative terhadap <i>Economic Growth</i> di Ghana.

7	Handayani dkk (2019)	<p>Dependen: Produk Domestik Regional Bruto</p> <p>Independen: Belanja Modal, Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>Populasi: Provinsi Sumatera Selatan Sampel: 15 Kabupaten/kota dari 17 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Metode: Regresi data panel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel belanja modal, infrastruktur panjang jalan, dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan - Belanja modal, infrastruktur panjang jalan, dan indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
8	Tobing, (2019)	<p>Dependen: Pertumbuhan ekonomi</p> <p>Independent: PAD dan dana perimbangan</p> <p>Variabel intervening: Belanja modal</p>	<p>Populasi: seluruh data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta data pertumbuhan ekonomi kabupaten /kota di wilayah Jawa Timur periode Tahun 2010-2015</p> <p>Sampel: 228 sampel</p> <p>Metode: analisis jalur (<i>path analysis</i>) dengan pengujian model jalur menggunakan analisis regresi berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal - Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal - PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi - Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi - Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi - PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal - Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal
9	Ningsih dan Noviaty, (2019)	<p>Dependen: Pertumbuhan ekonomi</p> <p>Independen: PAD dan dana perimbangan</p>	<p>Populasi: (tidak diketahui)</p> <p>Sampel: (tidak diketahui)</p> <p>Metode: regresi linier berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan - PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi - Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
10	Alvaro dan Prasetyo, (2020)	<p>Dependen: Belanja modal</p> <p>Independen: PAD, Dana</p>	<p>Populasi dan sampel: 33 provinsi di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal - DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal

		Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Variabel moderasi: Pertumbuhan ekonomi	Metode: Analisis data panel (Common Effect Model, <i>Fixed Effect Model</i> , dan <i>Random Effect Model</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal - DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal - Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal - Pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal - Pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal
11	Arlintang dkk (2020)	Dependen: Pertumbuhan Ekonomi independen: Investasi, Belanja Modal, dan Infrastruktur Ekonomi	Populasi dan sampel: Seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Metode: Regresi Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi, belanja modal, dan infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik yang termasuk dalam infrastruktur ekonomi berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
12	Fathia dan Rusdi, (2020)	Dependen: Belanja modal Independen: Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan Pendapatan Asli Daerah	Populasi: 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2018 Sampel: Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2018. Metode: Analisis regresi linear berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal - Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal - Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal - Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal - Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal - Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

13	Sulaiman, (2020)	<p>Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Independen: PAD dan Dana Alokasi Umum</p> <p>Intervening: Belanja Modal</p>	<p>Populasi: Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Sampel: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di 12 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2011-2017</p> <p>Metode: <i>Path Analysis</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal - Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal - Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
14	Elwarin dkk., (2021)	<p>Dependen: Belanja Modal</p> <p>Independen: Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus</p>	<p>Populasi dan sampel: 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat periode 2017-2019</p> <p>Metode: Analisis regresi linier berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja modal - Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal - Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja modal - Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja modal
15	Muttaqin dkk., (2021)	<p>Dependen: Belanja modal</p> <p>Independen: PAD dan dana perimbangan</p>	<p>Populasi: Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintahan Kabupaten Langkat</p> <p>Sampel: Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintahan Kabupaten Langkat 5 tahun mulai dari tahun 2014-2018</p> <p>Metode: regresi linier berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Langkat - Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Langkat

16	Yuliantoni dan Arza, (2021)	<p>Dependen: Belanja modal</p> <p>Independen: Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH)</p> <p>Variabel pemoderasi: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</p>	<p>Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia dari tahun 2015-2019 yang terdiri dari 34 Provinsi dengan jumlah 170 data yang di dapat dari Laporan Realisasi APBD tahun 2015-2019</p> <p>Metode: model regresi MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal - Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal - Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak memoderasi (memperlemah) pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak memoderasi (memperlemah) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak memoderasi (memperlemah) pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal.
17	Alvaro, (2022)	<p>Dependen: pertumbuhan ekonomi</p> <p>Independen: PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Dana Daerah Urusan Pendidikan</p>	<p>Smpel: 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia</p> <p>Metode: Model regresi data panel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi - Belanja barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Dana daerah urusan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
18	Mursyidah dkk., (2022)	<p>Dependen: <i>Economic Growth</i></p> <p>Independen: <i>Regional Revenue</i></p>	<p>Populasi dan Sampel: Jawa Timur, Sampel adalah 38 distrik/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010-2019</p>	<p>Dana alokasi umum (GAF) dan Dana alokasi khusus (SAF) memiliki efek, sementara Pembagian keuntungan (SF) tidak berpengaruh pada Pengeluaran Langsung (DS). Pendapatan asli regional (ROR) dan SF memiliki efek pada pertumbuhan ekonomi (EG)</p>

			Metode Penelitian: <i>Path Analysis</i>	sementara GAF memiliki efek negatif dan SAF tidak memiliki efek pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran Langsung memiliki pengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi. ROR, GAF, SAF, dan SF memiliki efek pada Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengeluaran Langsung.
19	Oktavia dan Zulvia, (2023)	Dependen: Pertumbuhan ekonomi Independen: PAD dan dana perimbangan	Populasi dan sampel: 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Metode: regresi data panel	<ul style="list-style-type: none"> - PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi - Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
20	Paudel, (2023)	Dependen: <i>Economic Growth</i> Independen: <i>Capital Expenditure</i>	Populasi dan Sampel: Data <i>time series</i> Nepal dari tahun 1981-2020 Metode Penelitian: <i>Auto-regressive distributed lag (ARDL)</i>	<i>Capital Expenditure</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Economic Growth</i> di Nepal
21	Silviani dan Adiputra, (2023)	Dependen: Belanja modal Independen: PAD dan dana perimbangan Variabel pemoderasi: <i>budget ratcheting</i>	Populasi: Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali Sampel: Laporan keuangan 8 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota Metode: Model regresi linier berjenjang	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal - Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal - Budget Ratcheting sebagai pemoderasi memiliki sifat moderasi memperkuat hubungan pengaruh PAD terhadap alokasi belanja modal - Budget Ratcheting sebagai pemoderasi memiliki sifat moderasi memperkuat hubungan pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal
22	Ayana dkk., (2024)	Dependen: <i>Economic Growth</i> Independen: <i>Government Revenue</i>	Populasi dan Sampel: Data panel dari tahun 2012-2022 negara-negara Sub-Sahara Afrika Metode Penelitian: GMM	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil dari estimasi sistem GMM mengungkapkan bahwa pendapatan pemerintah berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi sementara kualitas kelembagaan secara positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebelum berinteraksi satu sama lain. - Hasil penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa pendapatan

		Moderasi: <i>Institutional Quality</i>		pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut ketika dikombinasikan dengan kualitas kelembagaan.
23	Rahman, (2024)	Dependen: <i>Gross Regional Domestic Product (GRDP) Per Capita at Current Prices (ADBH)</i> Independen: <i>Special Autonomy Fund Transfer Realization</i>	Populasi dan Sampel: Aceh, Papua, dan West Papua dari tahun 2014-2022 Metode Penelitian: <i>Panel Regression analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak yang signifikan dari dana otsus terhadap PDRB Per Kapita ADHB, dengan R ² yang tinggi yaitu 94,2%.

Dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dibebaskan untuk menggunakan sumber-sumber keuangan daerahnya yang berupa Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Penelitian ini akan berfokus pada sumber keuangan daerah berupa dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan dana otonomi khusus yang diberikan untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak akan meningkat jika alokasi sumber keuangan daerah tidak dikelola dengan baik.

Untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pola manajemen belanja yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dipastikan mampu mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada perbaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ariadi, 2021). Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun dalam penelitian ini, penggunaan belanja modal akan digunakan sebagai variabel intervening yang mana belanja modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah sehingga pada penelitian ini belanja modal diproyeksikan akan menghubungkan sumber keuangan daerah yang berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan PAD dengan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, berdasarkan teori dan beberapa penelitian di atas maka penelitian ini akan mengkombinasikan ketiga variabel sumber keuangan daerah yaitu dana perimbangan, dana otonomi khusus dan Pendapatan Asli Daerah untuk dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan variabel belanja modal sebagai variabel penghubung.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan

pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Amin, 2019). Melalui alokasi dana perimbangan dalam bentuk belanja daerah baik belanja modal maupun belanja rutin inilah, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas dalam penggunaan anggaran tersebut. Sejalan dengan konsep teori keagenan, pemerintah daerah bertindak sebagai agen dalam pengalokasian belanja modal yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dimana pengalokasian tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik sebagai *principal* (Silviani dan Adiputra, 2023).

Penelitian Muttaqin dkk (2021) menunjukkan bahwa semakin besar dana perimbangan maka semakin besar pula pengalokasian terhadap belanja modal. Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya baik untuk kepentingan nasional maupun kepentingan rakyat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Silviani dan Adiputra (2023) dan Wiraswasta dkk (2018) juga menemukan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

H₁: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3.2 Hubungan Dana Otonomi Khusus dengan Belanja Modal

Pemanfaatan dana otonomi khusus Provinsi Aceh ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan (djpk.kemenkeu.go.id). Penerimaan Khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta Pos Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur (Amin, 2019). Dalam hal ini, teori keagenan dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dan DPR sebagai agen yang akan menetapkan alokasi dana otonomi khusus yang sesuai dengan tujuan salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang akan terealisasi melalui pembelanjaan modal guna memenuhi kesejahteraan masyarakat (*principal*). Penelitian Jikwa dkk (2017) menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Kabupaten Mamberamo Tengah diketahui positif mempengaruhi belanja modal. Kontribusi sumber dana OTSUS terhadap pembangunan sektor khususnya belanja modal memiliki andil yang cukup signifikan. Hasil penelitian serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Wanma dkk (2021) dan

Elwarin dkk (2021) bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

H₂: Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Semakin besar dan semakin banyak pendapatan yang diperoleh daerah maka daerah akan semakin mampu dan mandiri dalam membiayai belanja daerahnya (Herlin dkk., 2021). Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran (Sudaryo dkk., 2017). Yuliantoni dan Arza (2021) mengemukakan bahwa pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (*principal*) karena masyarakat telah melaksanakan kewajibannya melalui pajak, retribusi, dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Alvaro dan Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. PAD yang semakin tinggi, maka kewenangan daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya semakin besar, maka belanja modalnya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah semakin tinggi. PAD yang tinggi

akan memberikan manfaat untuk meningkatkan fasilitas publik termasuk pembangunan sarana dan prasarana. Penelitian serupa yang dilakukan Anwar dkk (2018), Wiraswasta dkk (2018) dan Silviani dan Adiputra (2023) juga menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

H₃: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.3.4 Hubungan Dana Perimbangan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mustanir dkk., (2023), dana perimbangan merupakan dana yang dialokasikan APBN kepada pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi yang diharapkan dapat mencapai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah. Dana perimbangan juga bertujuan untuk pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar daerah melalui formula yang memperhatikan kebutuhan dan peluang daerah. Dana transfer atau dana perimbangan diberikan oleh pemerintah dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan yang mana daerah diberikan kebebasan untuk membelanjakannya agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Dalam teori keagenan, hubungan kontrak antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dapat dilihat dari kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan mengelola dana perimbangan. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Zulvia (2023) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan sangat berperan penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi bagian dari perhatian khusus bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari daerah otonomi khusus untuk mempertimbangkan hal-hal dalam meningkatkan dana perimbangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi dan mereduksi kesenjangan antar daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Artinya, dengan ditransfernya dana perimbangan dari pusat daerah dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dengan demikian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

H₄: Dana Perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.3.5 Hubungan Dana Otonomi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pemberian dana otonomi khusus adalah untuk membantu daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi

rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, kesehatan dan sosial. Dengan demikian, penerimaan dana otsus diharapkan dapat menjadi stimulus peningkatan kesejahteraan masyarakat (Badan Keahlian DPR RI, 2020). Konsep teori keagenan dapat dilihat dari peran pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen dalam mengelola dana otonomi khusus yang diperoleh oleh Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat, yang mana tujuan utamanya adalah demi kesejahteraan masyarakat selaku *principal*. Suwandi (2015), mengemukakan bahwa jika suatu daerah yang menerima dana otonomi khusus ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya maka seyogyanya dana otonomi khusus juga bertumbuh secara positif. Penelitian oleh Anwar dkk., (2018) menemukan hasil bahwa dana otonomi khusus memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa apabila dana otonomi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dibentuk adalah: H₅: Dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.3.6 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Wulandari dan Emy (2018), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sumber-sumber dalam wilayahnya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu

daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dalam teori keagenan, masyarakat sebagai *principal* memberikan kontribusi dengan membayar pajak, retribusi dan sebagainya guna peningkatan pendapatan daerah yang akan dialokasikan oleh pemerintah daerah (agen) sebagai bentuk tanggung jawab dan timbal balik kepada masyarakat (Fathia & Rusdi, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Alvaro (2022) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya sebagai perwujudan desentralisasi. Apabila PAD yang diterima daerah semakin meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga pemerintah daerah dapat menggali potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Tobing (2019), Alvaro dan Prasetyo (2020), Ningsih dan Noviaty (2019), Wiraswasta dkk (2018), dan Anwar dkk (2018) yang menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

H₆: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.7 Hubungan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori Keynes salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah (Bahri & Aprilianti, 2023)(Bahri & Aprilianti, 2023). Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah adalah belanja modal. Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik digunakan sebagai dasar penganggaran belanja modal. Maka dari itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah perlu mengubah komposisi belanjanya. Pengelolaan APBD untuk pengeluaran daerah yang dialokasikan pada sektor pembangunan akan mendorong pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Yuliani, 2019). Menurut Wanma dkk (2021), dengan diadakannya belanja modal maka akan berdampak secara menyeluruh meliputi makro dan mikro untuk perekonomian nasional, terutama perekonomian daerah. Berdasarkan teori keagenan, peran pemerintah daerah (agen) dalam memaksimalkan anggaran belanja daerah dalam bentuk belanja modal merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Porsi belanja modal yang lebih besar akan berdampak pada peningkatan bidang sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah pada bidang fasilitas publik merupakan sektor pembentukan modal yang bisa meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat (*principal*) (Arlintang dkk, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2017), Abel dkk., (2019) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal terutama yang berkaitan dengan pengadaan infrastruktur, dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata. Penyebaran Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyebar sampai ke penjuru negeri. Dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

H₇: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.3.8 Hubungan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah guna pengembangan ekonomi lokal (Jayanti, 2020). Dalam teori keagenan, pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terlihat dari peran pemerintah sebagai agen harus mengalokasikan dana perimbangan yang diperoleh untuk kepentingan publik sesuai dengan tujuan dari diberikannya dana perimbangan itu sendiri. Salah satu peran pemerintah dalam upaya memaksimalkan alokasi dana perimbangan adalah dengan

membelanjakannya untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian masyarakat dan nantinya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan teori sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Wiraswasta dkk., (2018) menemukan hasil bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hubungan ini terjadi karena pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat direalisasikan melalui belanja modal yang salah satu sumber pendanaannya dari dana perimbangan. Dengan demikian, semakin tingginya pelayanan dan pembangunan maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan semakin meningkat. Dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

H₈: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal

2.3.9 Hubungan Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Sebagai bentuk dukungan guna mengurangi kesenjangan ekonomi, pemerintah Indonesia menggelontarkan dana otonomi khusus yang hanya di berikan kepada tiga provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Papua Barat. Dana otsus sendiri ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta

pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana otsus sendiri ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dalam teori keagenan, pemerintah bertindak sebagai agen yang harus mengalokasikan dana otonomi khusus yang diperoleh daerah demi mendukung tujuan utama dari dana otonomi itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat (*principal*). Salah satunya adalah dengan mengalokasikannya pada belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang nantinya dapat menunjang roda perekonomian masyarakat sebagai *principal*, kemudian akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan teori sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Wanma dkk., (2021) menemukan hasil bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Papua Barat. Dana otonomi khusus (DOK) dialokasikan pada beberapa daerah yang diberi otonomi khusus seperti daerah Aceh, Papua dan Papua Barat untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan penting yang ada di daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua Barat. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan dana otonomi khusus sehingga akan diikuti dengan meningkatnya PDRB. Hal ini sesuai dengan teori dan menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja

modal yang dilakukan pemerintah dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Handayani dkk., 2019). Dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

H₉: Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal

2.3.10 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah (Amin, 2019). Dalam teori keagenan hubungan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dengan pertumbuhan ekonomi dapat terlihat dari peran pemerintah yang harus mengelola dan menggunakan sumber keuangan daerah salah satunya adalah PAD secara mandiri demi kepentingan masyarakat (*principal*). Pengelolaan PAD oleh pemerintah daerah untuk menunjang perekonomian daerah salah satunya dengan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan hal ini dapat direalisasikan dengan belanja modal.

Sejalan dengan teori sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Wiraswasta dkk., (2018) menemukan hasil bahwa PAD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan

meningkatkan alokasi belanja modal. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana, fasilitas serta infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika suatu daerah menginginkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan menambah pengalokasian belanja modalnya di mana salah satu sumber pendanaannya adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah:

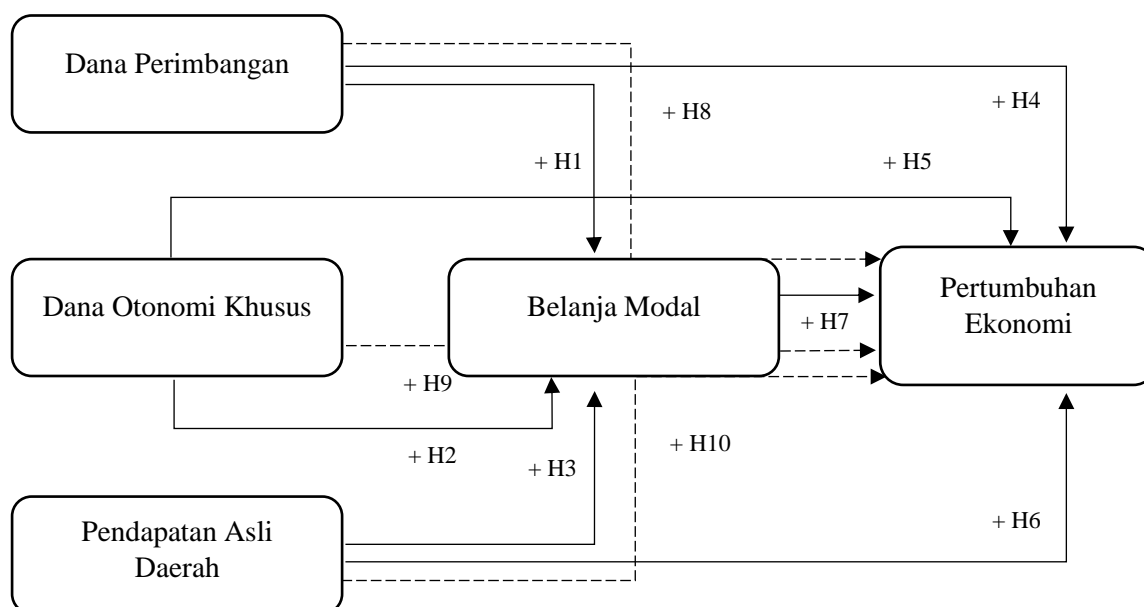
H₁₀: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

2.9 Kerangka Konseptual

Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber keuangan daerah yang berasal dari dana transfer maupun dari pendapatan daerah sendiri. Adapun terdapat daerah yang dikhususkan untuk menerima dana tambahan (dana otonomi khusus) yaitu Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah berhak mengelola sendiri sumber daya keuangan dan aset daerah yang tujuannya untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan daerah dalam menyejahterakan rakyatnya adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori Keynes dan Neo-Keynes, salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan melakukan investasi. Sejalan dengan teori tersebut, investasi publik merupakan salah satu yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat terealisasi dengan adanya belanja modal. Dalam konsep teori keagenan, pemerintah daerah dan masyarakat dapat dikatakan memiliki kontrak sebagai agen dan *principal* di mana masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai agen yang akan melaksanakan semua tugas dalam pemerintahan demi kesejahteraan *principal* (masyarakat). Dalam penelitian ini, akan dijelaskan bagaimana hubungan dari sumber keuangan daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat tahun 2010-2022.

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- = Pengaruh Langsung
- = Pengaruh Tidak Langsung

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Hikmawati, 2020). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu yang biasanya dilakukan atas pertimbangan tertentu. (Hikmawati, 2020). Adapun karakteristik pemerintah provinsi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah provinsi yang menerima dana perimbangan
- 2) Pemerintah provinsi yang menerima dana otonomi khusus
- 3) Pemerintah provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka sampel yang diperoleh adalah Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat tahun 2009-2023 dan BPS daerah. Berdasarkan waktu pengumpulan datanya, maka penelitian ini menggunakan data *time series crossection (polling data)* atau data panel yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dari Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang diteliti oleh penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Rapanna & Sukarno, 2017). Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi diukur dalam presentase (%).

3.3.2 Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu: Dana Perimbangan (X1), Dana Otonomi Khusus (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (X3).

3.3.2.1 Dana Perimbangan

Secara umum, dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Amin, 2019). Dana perimbangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Indikator dana perimbangan diperoleh dari akumulasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdapat pada laporan keuangan tahunan pemerintah daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Dana perimbangan diukur dalam satuan miliar Rupiah (Rp). Penggunaan satuan miliar Rupiah penting untuk memudahkan interpretasi jumlah dalam skala yang besar.

3.3.2.2 Dana Otonomi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Pemanfaatan dana otonomi khusus provinsi Aceh ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Adapun Pemanfaatan dana otonomi khusus provinsi Papua dan Papua Barat terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Indikator dana otonomi khusus diperoleh dari data realisasi dana otonomi khusus yang terdapat pada laporan keuangan tahunan pemerintah daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Dana Otonomi Khusus diukur dalam satuan miliar Rupiah (Rp).

3.3.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah sumber pendapatan yang diambil dari daerah, yang digunakan sebagai modal oleh pemerintah kota untuk membiayai kegiatan pembangunan dan kegiatan daerah, yang tujuannya adalah untuk meminimalkan ketergantungan pada sumber keuangan negara. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Sudaryo dkk., 2017). Indikator PAD dalam penelitian ini diperoleh dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah yang terdapat pada laporan keuangan tahunan pemerintah daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat dan diukur dalam satuan miliar Rupiah (Rp).

3.3.3 Variabel Intervening

Variabel intervening berperan sebagai perantara dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan kata lain, variabel intervening adalah variabel yang berada di tengah-tengah variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak memiliki pengaruh langsung atau penjelasan langsung terhadap variabel dependen (Anshori & Sri, 2017).

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, peralatan dan aset tetap lainnya (Khusaini, 2018). Belanja modal menunjukkan besarnya belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Semakin besar belanja modal maka akan berdampak pada besarnya pertumbuhan ekonomi (Hidayat, 2017). Indikator yang digunakan adalah jumlah belanja modal yang terdapat pada data realisasi belanja modal yang

terdapat pada laporan keuangan tahunan pemerintah daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Belanja modal diukur dalam satuan miliar Rupiah (Rp).

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Ukur	Keterangan
Dana Otonomi Khusus (DOK)	Jumlah Dana Otonomi Khusus	Miliar Rupiah (Rp)	Variabel Independen (X1)
Dana Perimbangan (DP)	Jumlah Dana Perimbangan	Miliar Rupiah (Rp)	Variabel Independen (X2)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD	Miliar Rupiah (Rp)	Variabel Independen (X3)
Belanja Modal (BM)	Jumlah Belanja Modal	Miliar Rupiah (Rp)	Variabel Intervening (Y1)
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	PDRB Harga Konstan	Presentase (%)	Variabel Dependen (Y2)

3.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan jenis data yang dikumpulkaa, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data panel. Data panel adalah gabungan dari data cross-section dan data *time series*, di mana unit *cross-section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Dengan kata lain, data panel adalah data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu (Napitupulu dkk., 2021). Dalam observasi, penggunaan data panel memiliki beberapa keuntungan. Pertama, karena data panel terdiri dari gabungan dua rangkaian *time series* dan *cross-section*, maka dapat menyediakan lebih banyak data yang menghasilkan tingkat *degree of freedom* yang lebih tinggi. Selanjutnya, menggabungkan informasi dari rangkaian *time series* dan *cross-section* dapat menyelesaikan masalah ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*) (Rifkhan, 2022). Tahap analisis yang dilakukan

dalam penelitian ini yaitu, pemilihan model estimasi, uji asumsi klasik, uji statistik (hipotesis) dan perumusan analisis jalur (*Path Analysis*) dengan menggunakan software statistik Eviews 12.

3.4.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi

Metode estimasi regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) (Napitupulu dkk., 2021).

3.4.1.1 Common Effect Model (CEM)

CEM merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*, pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel, oleh karena itulah metode ini disebut juga dengan istilah *Pooled Least Square* (PLS).

3.4.1.2 Fixed Effect Model (FEM)

Pada *Fixed Effect Model* (FEM), perbedaan antara individu dapat diterima dari perbedaan intersepnya. Teknik variable dummy dapat digunakan untuk mengestimasi data panel FEM untuk mengidentifikasi perbedaan intersep di antara perusahaan. Namun, kecenderungan ini sama di semua perusahaan. Teknik

Least Squares Dummy Variable (LSDV) adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut model estimasi ini. Metode ini menganggap bahwa meskipun intersep setiap individu berbeda, slope antar individu adalah tetap (Napitupulu, 2021).

3.4.1.3 Random Effect Model (REM)

Model FEM mengestimasi data panel di mana variabel gangguan dapat saling berhubungan baik secara individu maupun secara waktu. Pada model *Random Effect*, *error term* masing-masing perusahaan mengakomodasi perbedaan intersep. Keuntungan dari menggunakan REM terdiri dari penghapusan heteroskedastisitas. *Model Error Component* (ECM) dan *Generalized Least Square Technique* (GLS) adalah nama lain untuk model ini (Napitupulu dkk., 2021).

3.4.2 Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Beberapa pengujian yang dipakai untuk memilih model yang paling tepat yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier* (Napitupulu dkk., 2021).

3.4.2.1 Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik antara CEM dan FEM. Hipotesis nul dari uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, hipotesis alternatif adalah bahwa intersep

tidak sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect*.

H₀: Model CEM

H_a: Model FEM

Ketentuan: jika probabilitas dari *cross section chi-square* > 0,05 (5%) maka H₀ diterima, namun jika probabilitas *cross-section chi-square* < 0,05 maka H₀ ditolak.

3.4.2.2 Uji Hausman

Pengujian Hausman digunakan untuk menentukan apakah FEM atau REM yang paling sesuai untuk digunakan. Menurut hipotesis nul, REM adalah model yang paling cocok untuk regresi data panel, sedangkan hipotesis lain adalah FEM.

H₀: Model REM

H_a: Model FEM

Ketentuan: jika probabilitas dari *cross section random* > 0,05 (5%) maka H₀ diterima, namun jika probabilitas *cross-section random* < 0,05 maka H₀ ditolak.

3.4.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji LM dilakukan untuk memilih antara REM atau CEM yang lebih cocok untuk digunakan. Uji ini menggunakan model *Breusch-Pagan* yang didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect*.

Hipotesis nulnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah CEM dan hipotesis alternatifnya adalah REM.

H_0 : Model REM

H_a : Model CEM

Ketentuan: jika probabilitas $> 0,05$ (5%) maka H_0 diterima, namun jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian data panel tidak semua asumsi klasik digunakan, hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas saja yang dipakai (Napitupulu dkk., 2021). Uji linearitas hampir tidak dilakukan pada semua model regresi linier. Hal ini karena model diasumsikan linier. Sekalipun itu hanya diperlukan untuk memeriksa derajat linearitasnya. Autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Saat menggunakan beberapa variabel independen dalam regresi linier, multikolinearitas harus dilakukan. Jika hanya ada satu variabel independen maka tidak terjadi multikolinearitas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross-sectional*. Dalam hal ini, data panel lebih mirip karakteristik data *cross-sectional* dibandingkan *time series*. Pengujian normalitas pada dasarnya bukanlah persyaratan BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*) dan beberapa berpendapat bahwa persyaratan ini tidak perlu dipenuhi (Napitupulu dkk., 2021).

3.4.3.1 Uji Multikolinearitas

Karena model regresi data panel berbeda dari model regresi linier, maka harus terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. Sangat tidak dianjurkan terdapat korelasi yang kuat (multikolinearitas) antara variabel bebas yang membentuk sebuah model (persamaan) karena hal itu akan berdampak pada keakuratan pendugaan parameter, khususnya koefisien regresi dalam menghitung nilai yang sebenarnya. Salah satu cara untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas adalah dengan mencari nilai koefisien korelasi antar variabel bebas. Adapaun ketentuannya adalah

- a) Nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas $< 0,85$ maka tidak terjadi masalah multikolinieritas.
- b) Nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas $> 0,85$ maka terdapat gejala multikolinieritas (Napitupulu dkk., 2021).

3.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari suatu residual pengamatan ke pengamatan lain. Suatu model yang baik adalah yang memiliki varians yang konstan dari setiap gangguan atau residualnya. Heteroskedastisitas terjadi ketika asumsi tidak tercapai, dengan kata lain, ekspektasi dari error dan varians dari error berbeda tiap periode waktu. Terdapat beberapa pengujian untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas salah satunya

adalah dengan Uji Glejser. Pada Uji Glejser hal yang perlu dilakukan adalah meregresikan nilai absolut residual (ABSResid) terhadap variabel independen dengan ketentuan apabila nilai signifikansi $>0,05$ maka terbebas dari gejala heteroskedastisitas (Napitupulu dkk., 2021).

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Uji t

Uji t merupakan pengujian kepada koefisien regresi untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Sahir, 2022). Adapun ketentuan dari uji t yaitu:

H_0 : $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen.

H_1 : $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen.

3.4.4.2 Uji F

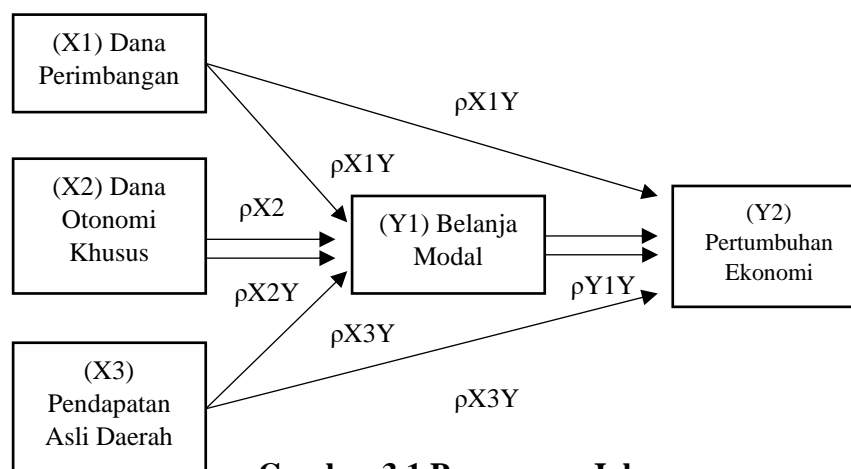
Uji F dipakai untuk mengetahui kesesuaian model regresi dengan data (*goodness of fit*). Pembuktian dicoba dengan metode menyamakan angka F hitung dengan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 5% dan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel (Sahir, 2022).

3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan R^2 pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat (Sahir, 2022).

3.4.5 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Untuk menguji intervening digunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur umumnya digunakan untuk menganalisis pola ikatan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui adakah akibat langsung serta tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat (Sahir, 2022). Adapun persamaan jalur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Persamaan Jalur

Model Sub Struktural 1:

$$Y_1 = \alpha + \beta X_1 Y_1 + \beta X_2 Y_1 + \beta X_3 Y_1 + \epsilon_1 \dots$$

Model Sub Struktural 2:

$$Y_2 = \alpha + \beta X_1 Y_2 + \beta X_2 Y_2 + \beta X_3 Y_2 + \beta Y_1 Y_2 + \epsilon_2 \dots$$

Di mana:

α : Konstanta

β : Koefisien variabel

X1: Dana Perimbangan

X2: Dana Otonomi Khusus

X3: Pendapatan Asli Daerah

Y1: Belanja Modal

Y2: Pertumbuhan Ekonomi

ϵ : *Error Term*

Untuk memeriksa pengaruh tidak langsung yang terdapat pada model analisis jalur lengkap maka digunakan Uji Sobel dengan menggunakan nilai koefisien dan standar error model terpilih (Napitupulu dkk., 2021). Berikut rumus Sobel test untuk menguji sejauh mana variabel belanja modal mampu memediasi variabel independen dengan variabel dependen.

$$Z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}}$$

Di mana:

a = Koefesien regresi variabel independen terhadap variabel mediasi

b = Koefesien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen

SE_a = *Standard error of estimation* dari pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi

SE_b = *Standard error of estimation* dari pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat

4.1.1 Provinsi Aceh

Provinsi Aceh merupakan provinsi paling barat Indonesia. Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 56.839,09 km² dan terbagi menjadi 23 kabupaten/kota dengan 290 kecamatan dan 6.516 desa/gampong serta dihuni 3,42 juta jiwa. Selama tahun 2020-2023, Provinsi Aceh mencatat angka persentase penduduk miskin yang fluktuatif baik secara regional maupun nasional, walaupun secara nasional lebih rendah. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan empat provinsi di Sumatera masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional (9,36 persen) dan Provinsi Aceh merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh meningkat sebesar 3,8% (tidak termasuk migas), dan laju pertumbuhan ekonomi dengan migas juga meningkat sebesar 4,21%.

4.1.2 Provinsi Papua

Papua adalah provinsi paling timur Indonesia, dan ibukotanya adalah Jayapura. Secara geografis Provinsi Papua berbatasan dengan Papua Nugini di timur, Laut Arafuru di selatan, Papua Barat di barat dan bagian utara dibatasi Samudera Pasifik. Provinsi Papua mempunyai luas wilayah 312.816,35 km² dan terbagi menjadi 28 kabupaten dan 1

kotamadya serta dihuni 4,42 juta jiwa. Pada tahun 2022, Provinsi Papua masih menjadi provinsi termiskin di tingkat nasional dengan tingkat kemiskinan sebesar 26,56% kemudian diikuti Papua Barat (21,33 %) dan Nusa Tenggara Timur (20,05%). Faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Papua kemungkinan karena rendahnya tingkat pendidikan, minimnya infrastruktur, dan banyaknya daerah terpencil yang sulit dijangkau. Pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Papua menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 8,97%. Angka ini melambat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh mencapai 15,11%.

4.1.3 Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat yang semula bernama Irian Jaya Barat, merupakan bagian dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Inpres No. 1 tahun 2003. Dengan disahkannya PP Nomor 24 Tahun 2007, provinsi ini resmi berganti nama menjadi Provinsi Papua Barat pada tanggal 18 April 2007. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, luas wilayah Provinsi Papua Barat adalah 99.398,26 km² dan dihuni 1.168.422 penduduk. Pada awal pemekaran, Papua Barat terdiri dari empat wilayah administratif: Kabupaten Fakfak, Sorong, Manokwari, dan Kota Sorong. Saat ini Papua Barat terbagi menjadi 13 wilayah administratif yang terdiri dari 12 kabupaten dan satu kota. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur wilayahnya secara

mandiri dari pemerintah pusat dengan prinsip oleh dan untuk rakyat Papua Barat.

Pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 tumbuh sebesar 2,01 persen. Angka yang cukup baik mengingat pada tahun 2020 dan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat mengalami kontraksi sebesar 0,76 persen pada tahun 2020, dan 0,51 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan pada tahun 2022 ini menunjukkan bahwa perekonomian Papua Barat sudah mulai pulih.

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

Keterangan		Variabel					
		X1	X2	X3	Y1	Y2	Y2%
Mean	Aceh	Rp2.878.821,32	Rp6.424.479,73	Rp1.910.355,96	Rp2.263.664,20	Rp115.779.106,10	2,23%
Maximum		Rp4.279.088,34	Rp8.357.471,65	Rp2.987.188,69	Rp3.696.304,08	Rp146.932.422,11	4,61%
Minimum		Rp1.561.778,47	Rp3.728.282,00	Rp735.205,79	Rp815.338,78	Rp32.219.086,32	-5,51%
Mean	Papua	Rp3.060.310,49	Rp5.550.524,73	Rp1.057.798,36	Rp1.637.849,98	Rp130.196.919,43	4,66%
Maximum		Rp5.004.746,24	Rp8.674.676,70	Rp2.226.754,65	Rp2.865.461,76	Rp181.926.534,45	20,34%
Minimum		Rp1.393.688,55	Rp1.051.198,66	Rp363.100,75	Rp498.844,96	Rp22.926.545,76	-15,74%
Mean	Papua Barat	Rp2.959.324,41	Rp2.518.959,90	Rp353.633,92	Rp1.314.279,52	Rp51.180.024,56	8,41%
Maximum		Rp6.907.515,33	Rp4.015.253,77	Rp620.226,53	Rp2.435.058,12	Rp62.518.525,55	46,56%
Minimum		Rp1.030.362,65	Rp1.011.942,25	Rp73.617,90	Rp606.120,33	Rp28.221.352,20	-0,76%

Sumber: Data olahan (juta)

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa variabel X1 yang merupakan dana Perimbangan dari Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat masing-masing memiliki jumlah rata-rata sebesar Rp2.878.821,32,- Rp3.060.310,49,- dan Rp2.959.324,41,-. Dana perimbangan tertinggi dan terendah berasal dari Provinsi Papua Barat dengan jumlah tertinggi Rp6.907.515,33,- yaitu pada

tahun 2019 dan nilai terendah Rp1.030.362,65,- pada tahun 2009. Variabel X2 yang merupakan dana otonomi khusus memiliki jumlah rata-rata Rp6.424.479,73,- di Provinsi Aceh, Rp5.550.524,73,- di Papua sedangkan Papua Barat memperoleh Rp2.518.959,90,-. Dana otonomi khusus tertinggi dan terkecil berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing yaitu Rp8.674.676,70,- pada tahun 2019 dan nilai terendah Rp1.011.942,25,- pada tahun 2023. Variabel X3 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata Rp1.910.355,96,- untuk Provinsi Aceh, Rp1.057.798,36,- untuk Provinsi Papua dan Rp353.633,92,- untuk Provinsi Papua Barat. Pendapatan Asli Daerah tertinggi dan terendah masing-masing berasal dari Provinsi Aceh dan Papua Barat yaitu Rp2.987.188,69,- pada tahun 2023 dan Rp73.617,90,- pada tahun 2010. Variabel Y1 yang merupakan belanja modal dari Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat masing-masing memiliki jumlah rata-rata Rp2.263.664,20,-, Rp1.637.849,98,- dan Rp1.314.279,52,-. Belanja modal tertinggi dan terendah masing-masing berasal dari Provinsi Aceh dan Papua yaitu Rp3.696.304,08,- pada tahun 2009 dan Rp498.844,96,- pada tahun 2023. Variabel Y2 yang merupakan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat masing-masing memiliki nilai rata-rata Rp115.779.106,10,-, Rp130.196.919,43,-, dan Rp51.180.024,56,-. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah berasal dari Papua Barat dan Papua yaitu 46,56% pada tahun 2010 dan -15,74% tahun 2019.

4.3 Estimasi Model Regresi Data Panel

Untuk menguji intervening digunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur umumnya digunakan untuk menganalisis pola ikatan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui adakah akibat langsung serta tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat (Sahir, 2022). Berikut pemodelan analisis jalur yang dibentuk:

Model Sub Struktural 1:

$$Y1 = \alpha + \beta X1Y1 + \beta X2Y1 + \beta X3Y1 + \epsilon1...$$

Model Sub Struktural 2:

$$Y2 = \alpha + \rho X1Y2 + \rho X2Y2 + \rho X3Y2 + \rho Y1Y2 + \epsilon2...$$

Dimana : α	Konstanta
X1	Dana Perimbangan
X2	Dana Otonomi Khusus
X3	PAD
Y1	Belanja Modal
Y2	Pertumbuhan Ekonomi
β	Koefisien Variabel
ϵ	Error

Metode estimasi regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM) atau *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) (Napitupulu, 2021). Beberapa pengujian yang dipakai untuk memilih model yang paling tepat yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier (Napitupulu, 2021). Berikut merupakan model terpilih dari ketiga model yang telah dipaparkan sebelumnya.

4.3.1 Uji Substruktural I

$$Y_1 = \alpha + \beta X_1 Y_1 + \beta X_2 Y_1 + \beta X_3 Y_1 + \epsilon_1 \dots$$

Persamaan substruktural I yang menguji hubungan antara variabel Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan PAD terhadap Belanja Modal diperoleh model *Common Effect Model* (CEM) sebagai model terbaik. Berikut hasil Uji Chow dengan *software* Eviews 12.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow Model Sub Struktural I

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	3.092049	(2,39)	0,0567
Cross-section Chi-Square	6.623260	2	0,0365

Dari output uji Chow di atas, diperoleh nilai probabilitas $0,0567 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian model terbaik jatuh kepada *Common Effect Model* (CEM). Pengujian selanjutnya adalah memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) dengan Uji Lagrange Multiplier. Berikut hasil dari Uji Lagrange Multiplier.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0,155314 (0,6935)	0,270451 (0,6030)	0,425765 (0,5141)

Dari output uji Lagrange Multiplier di atas diperoleh nilai Cross-section Breusch-Pagan $0,6935 > 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan menerima H_a . Dengan demikian model terbaik dari persamaan sub struktural I adalah *Common Effect Model* (CEM).

4.3.2 Uji Substruktural II

$$Y_2 = \alpha + \rho X_1 Y_2 + \rho X_2 Y_2 + \rho X_3 Y_2 + \rho Y_1 Y_2 + \epsilon_2 \dots$$

Persamaan substruktural II yang menguji hubungan antara variabel Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi diperoleh model *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model terbaik. Berikut hasil Uji Chow dengan *software* Eviews 12.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow Model Sub Struktural II

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	17,195708	(2,38)	0,0000
Cross-section Chi-Square	29,002570	2	0,0000

Dari output uji Chow di atas, diperoleh nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan menerima H_a . Dengan demikian model terbaik jatuh kepada *Fixed Effect Model* (FEM). Karena keterbatasan data yang tidak bisa mendukung pengujian model REM oleh sebab itu pengujian selanjutnya akan digunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Jika T (jumlah data *time series*) besar dan N (jumlah unit *cross-sectional*) kecil, kemungkinan besar perbedaan nilai parameter yang diestimasi dengan FEM dan REM kecil. Oleh karena itu pilihan di sini didasarkan pada kenyamanan komputasi. Dalam hal ini, FEM adalah pilihan yang lebih baik (Gujarati & Porter, 2009).

4.4 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian data panel tidak semua asumsi klasik digunakan, hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas saja yang dipakai (Napitupulu dkk., 2021). Berikut hasil uji asumsi klasik yang diperoleh:

4.4.1 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Effect Test	X1	X2	X3	Y1
X1	1.000000	0,420503	0, 268097	0, 277156
X2	0,420503	1.000000	0, 629016	0, 556794
X3	0,268097	0,629016	1.000000	0,392069
Y1	0,277156	0,556794	0,392069	1.000000

Dari hasil uji multikolinearitas di atas, dapat dilihat bahwa korelasi antar variabel tidak terdapat nilai $> 0,90$ yang artinya model terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model substruktural I

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,026922	0,069813	-0,385625	0,7018
X2	0,021308	0,041788	0,509906	0,6129
X3	-0,041260	0,102249	-0,403529	0,6887
C	458858,5	215940,1	2,124934	0,0397

Dependen variabel: ABS(RESID)

Berdasarkan hasil olah data pada model sub struktural I menggunakan Uji Glejser, dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai Prob. $> 0,05$ yang berarti model telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model substruktural II

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
X1	1,112129	2,363953	0,470453	0,6407
X2	-5,295248	1,532733	-3,454776	0,0014
X3	1,445849	3,403991	0,424751	0,6734
Y1	3,952875	3,546364	1,114627	0,2720
C	25952748	7592185,0	3,418350	0,0015

Variabel dependen: ABS(RESID)

Berdasarkan hasil olah data pada model sub struktural II menggunakan Uji Glejser, dapat diketahui bahwa terdapat variabel independen yang memiliki nilai Prob. < 0,05 yang berarti model mengalami gejala heteroskedastisitas. Langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan salah satunya dengan cara mengubah kebentuk model *cross-section weights* (Napitupulu dkk., 2021).

Tabel 4. 8 Hasil Perbaikan Uji Heteroskedastisitas dengan *Cross-section weights*

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
X1	4,074054	1,964269	2,074082	0,0449
X2	3,819733	1,853757	2,060536	0,0462
X3	15,68093	4,601769	3,407587	0,0016
Y1	-5,899294	3,385311	-1,742615	0,0895
C	60091723	7913031,0	7,594021	0,0000

Variabel dependen: Y2

Setelah dilakukan perbaikan dengan *cross-section weights*, maka dapat diasumsikan bahwa data sudah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji t

Uji t merupakan pengujian kepada koefisien regresi untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Sahir, 2022). Adapun ketentuan dari uji t yaitu:

H_0 : $t \text{ hitung} \leq t \text{ table}$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen.

H_1 : $t \text{ hitung} > t \text{ table}$ maka terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen.

Adapun hasil uji t pada model sub struktural I dan II dapat diringkas pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 9 Hasil Uji t Model Substruktural I dan II

Variable	Coefficient I	Coefficient II	Prob. I	Prob. II
X1	0,034435	4,074054	0,7171	0,0449
X2	0,157346	3,819733	0,0081	0,0462
X3	0,057312	15,68093	0,6806	0,0016
Y1	-	-5,899294	-	0,0895
C	787533,2	60091723		

Sumber: Data Olahan software Eviews 12

Model persamaan regresi yang dapat dibentuk dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

$$Y1 = 787533,2 + 0,034435X1 + 0,157346X2 + 0,057312X3 + \varepsilon$$

$$Y2 = 60091723 + 4,074054X1 + 3,819733X2 + 15,68093X3 - 5,899294Y1 + \varepsilon$$

- a. $\alpha Y1 = 787533,2$ artinya apabila variabel X1, X2 dan X3 sebesar 0 maka belanja modal (Y1) memiliki nilai 787533,2.
- b. Nilai $\beta X1Y1 = 0,034435$ dengan probabilitas t hitung variabel X1 terhadap Y1 sebesar 0,7171 $> 0,05$ yang berarti bahwa variabel X1 dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y1 belanja modal.
- c. Nilai $\beta X2Y1 = 0,157346$ dengan probabilitas t hitung X2 terhadap Y1 sebesar 0,0081 $< 0,05$ yang berarti variabel X2 dana otonomi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal secara langsung. Artinya, setiap peningkatan dana otonomi khusus sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,157346.
- d. Nilai $\beta X3Y1 = 0,057312$ dengan probabilitas t hitung X3 yang merupakan PAD sebesar 0,6806 $> 0,05$ yang berarti variabel X3 PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
- e. $\alpha Y2 = 60091723$, artinya apabila variabel X1, X2, X3 dan Y1 sebesar 0 maka pertumbuhan ekonomi (Y2) memiliki nilai 60091723.

- f. Nilai $\beta_{X1Y2} = 4,074054$ dengan probabilitas t hitung X1 terhadap Y2 sebesar $0,0449 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel X1 dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Artinya, setiap peningkatan dana perimbangan sebesar 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 4,074054.
- g. Nilai $\beta_{X2Y2} = 3,819733$ dengan probabilitas t hitung X2 terhadap Y2 sebesar $0,0462 < 0,05$ yang berarti variabel X2 dana otonomi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Artinya setiap peningkatan DOK sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,819733.
- h. Nilai $\beta_{X3Y2} = 15,68093$ dengan probabilitas t hitung X3 terhadap Y2 sebesar $0,0016 < 0,05$ yang berarti variabel X3 PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Artinya setiap peningkatan PAD sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 15,68093.
- i. Nilai $\beta_{X4Y2} = - 5,899294$ dengan probabilitas t hitung Y1 terhadap Y2 sebesar $0,0895 > 0,05$ yang berarti variabel Y1 belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F-Statistik)

Uji F dipakai untuk mengetahui kesesuaian model regresi (*goodness of fit*). Pembuktian dicoba dengan metode menyamakan angka F_{hitung} dengan F_{tabel} (Sahir, 2022). Berikut hasil dari pengujian F-Statistik.

Tabel 4. 10 Hasil Uji F Statistik

Weight Statistic	
F-statistic	53,71628
Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F-Statistik adalah 53,71628 lebih besar dari F tabel yaitu 2,65 dan probabilitas signifikansi

$0,0000 < 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, PAD dan belanja modal secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi.

4.5.3 Uji *R Square* (Koefisien Determinasi)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Di bawah ini merupakan tabel ringkas dari pengujian *R Square*, antara lain sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Tabel Hasil Uji R Square

Weight Statistic	
R-square	0,894532
Adjusted R-square	0,877879

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R-square* adalah 0,877879. Dari angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen penelitian ini yaitu dana perimbangan, dana otonomi khusus, PAD dan belanja modal dapat menjelaskan 87,78%, perubahan variabel dependen pertumbuhan ekonomi (Y1) dan sisanya sebesar 12,22% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.6 Uji Sobel

Untuk memeriksa pengaruh tidak langsung yang terdapat pada model analisis jalur lengkap maka digunakan Uji sobel dengan menggunakan nilai koefisien dan standar error model terpilih (Napitupulu dkk., 2021).

4.4.1 Variabel dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal

$$Z = \frac{0,034435 * -5,899294}{\sqrt{(-5,899294^2 * 0,0943398^2) + (0,034435^2 * 3,385311^2)}}$$

$$Z = \frac{-0,203142189}{\sqrt{0,323324}}$$

$$Z = \frac{-0,203142189}{0,568616}$$

$$Z = -0,3572$$

Hasil uji sobel yang diperoleh adalah $-0,3572 < 1,96$ dengan tingkat signifikansi 5% yang berarti variabel belanja modal tidak dapat memediasi hubungan antara variabel dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi.

4.4.2 Variabel dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal

$$Z = \frac{0,157346 * -5,8992994}{\sqrt{(-5,8992994^2 * 0,056504^2) + (0,157346^2 * 3,385311^2)}}$$

$$Z = \frac{-0,928230314}{\sqrt{0,394844}}$$

$$Z = \frac{-0,928230314}{0,628366}$$

$$Z = -1,4772$$

Hasil uji sobel yang diperoleh adalah $-1,4772 < 1,96$ dengan tingkat signifikansi 5% yang berarti variabel belanja modal tidak dapat memediasi hubungan antara variabel dana otonomi khusus dengan pertumbuhan ekonomi.

4.4.3 Variabel PAD terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal

$$Z = \frac{0,057312 * -5,899294}{\sqrt{(-5,899294^2 * 0,138257^2) + (0,057312^2 * 3,385311^2)}}$$

$$Z = \frac{-0,338100338}{\sqrt{0,702877199}}$$

$$Z = \frac{-0,338100338}{0,838377719}$$

$$Z = -0,4032$$

Hasil uji sobel yang diperoleh adalah $-0,4032 < 1,96$ dengan tingkat signifikansi 5% yang berarti variabel belanja modal tidak dapat memediasi hubungan antara variabel PAD dengan pertumbuhan ekonomi.

4.7 Pembahasan

1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Oleh karenanya H_1 tidak didukung oleh data. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain dan Haryati (2023) yang juga menemukan hasil bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dengan tujuan utama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Amin, 2019). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat cenderung tidak menggunakan dana perimbangan untuk keperluan belanja

modal. Sebaliknya dana perimbangan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja pegawai dan belanja operasional lainnya. Hal ini dapat diketahui dari porsi belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja modal. Maka dari itu, besarnya porsi dana perimbangan yang diterima oleh Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas belanja modal. Dana perimbangan, meskipun diperuntukkan untuk mendukung otonomi daerah, sering kali tidak dimaksimalkan untuk investasi jangka panjang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hal ini dapat disebabkan oleh ketergantungan daerah terhadap dana pusat yang lebih fokus pada kebutuhan operasional dan administratif daripada pembangunan infrastruktur atau proyek modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Chasbiandani dkk., 2022; Sari dan Djuanda, 2018).

Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin dkk., (2021), Silviani dan Adiputra, (2023) dan Wiraswasta dkk., (2018) yang menemukan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Perbedaan hasil ini salah satunya dapat dipengaruhi oleh objek penelitian yang berbeda sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga berbeda sesuai dengan konsep otonomi daerah.

Sejalan dengan konsep teori keagenan, pemerintah sebagai agen bertindak dalam menentukan kebijakan dalam mengelola dana perimbangan salah satunya dengan dialokasikan pada belanja modal. Sesuai dengan tujuan alokasi belanja modal yaitu untuk pembiayaan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka penambahan alokasi belanja modal pada pemerintah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat diharapkan mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat selaku *principal*. Hasil penelitian mengonfirmasi teori keagenan dimana pemerintah daerah menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah meskipun peningkatan tersebut belum maksimal dalam pelaksanaannya dilihat dari peruntukan dana perimbangan yang masih cenderung digunakan untuk belanja operasional.

2. Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal secara langsung. Hal ini berarti H_2 didukung oleh data. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jikwa dkk (2017), Wanma dkk (2021) dan Elwarin dkk (2021) yang menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus (OTSUS) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Kontribusi sumber dana OTSUS terhadap pembangunan sektor khususnya belanja modal memiliki andil yang cukup signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana otonomi khusus maka juga akan meningkatkan belanja modal. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan

oleh Fahrizal dan Sukartini (2024) di Provinsi Aceh dan Basna dkk (2022) di Teluk Bintuni menemukan hasil yang sebaliknya yaitu dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dimungkinkan terjadi karena lingkup objek penelitian yang berbeda sehingga mempengaruhi hasil penelitian yang berbeda pula.

Dana otonomi khusus yang diberikan ke tiga provinsi yaitu Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat memiliki kontribusi paling besar dari total pendapatan yang diterima. Besarnya kontribusi dana otonomi khusus pada sumber pendapatan daerah tentu saja memberikan pengaruh yang signifikan pada alokasi belanja daerah khususnya belanja modal karena sumber pendapatan lain seperti dana perimbangan dan PAD digunakan untuk keperluan belanja daerah yang lain karena porsi belanja modal lebih sedikit dibandingkan dengan belanja operasi.

Sesuai dengan teori keagenan, maka pemerintah sebagai agen sudah bertindak sesuai dengan perannya dalam menentukan kebijakan alokasi pendanaan, maka hal ini sesuai dengan tujuan awal diberikannya dana otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat selaku principal. Salah satunya yaitu pengalokasian dana otonomi khusus pada belanja modal yang memberikan masa manfaat jangka panjang di mana hal ini juga diharapkan mampu menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian H_3 tidak didukung oleh data. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisandri dkk (2017), Wanma dkk (2021) dan Yuliantoni dan Arza (2021) yang menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil yang tidak signifikan mengindikasikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak sebanding dengan meningkatnya belanja modal. Secara keseluruhan, jumlah PAD dari Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat memiliki porsi paling sedikit dari semua sumber keuangan daerah yang dimiliki. Rendahnya jumlah PAD yang diperoleh daerah memberikan indikasi bahwa daerah masih menggantungkan pengeluaran daerah dari sumber keuangan lain yaitu dana transfer terutama dana otonomi khusus yang memiliki porsi paling besar. Tidak adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal dikarenakan jumlah PAD yang sedikit sehingga tidak mampu untuk membiayai kebutuhan daerah (Wanma dkk, 2021). PAD memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya, seperti dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sebagai contoh, banyak daerah yang masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai belanja modal, sementara PAD lebih sering digunakan untuk kebutuhan pengeluaran operasional dan belanja rutin lainnya.

Di sisi lain, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvaro dan Prasetyo (2020), Anwar dkk (2018), Wiraswasta dkk (2018) dan Silviani dan Adiputra (2023) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Jika PAD semakin tinggi kewenangan daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya semakin besar, maka belanja modal yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah juga akan semakin tinggi. PAD yang tinggi akan memberikan manfaat untuk meningkatkan fasilitas publik termasuk pembangunan sarana dan prasarana. Perbedaan hasil penelitian ini dimungkinkan dapat terjadi karena perbedaan lingkup objek penelitian sehingga mempengaruhi hasil yang diperoleh.

Sesuai dengan teori keagenan, pemerintah daerah selaku agen bertanggung jawab kepada masyarakat (*principal*) karena masyarakat telah melaksanakan kewajibannya melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting sebagai pihak yang dipercaya mampu menggali lebih banyak potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya. Hal ini karena masyarakat telah memberikan kepercayaan penuh pada pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya diharapkan juga akan menaikkan tingkat kemandirian daerah agar tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori keagenan yang mana pemerintah daerah menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah

meskipun peningkatan tersebut belum maksimal dalam pelaksanaannya yang dapat dilihat dari pengalokasian PAD yang sebagian besar masih digunakan untuk keperluan belanja operasional.

4. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian ini menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga H_4 didukung oleh data. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiraswasta dkk (2018) dan Oktavia dan Zulvia (2023) yang menemukan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meningkatnya dana perimbangan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan sangat berperan penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi bagian dari perhatian khusus bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari daerah otonomi khusus untuk mempertimbangkan hal-hal dalam meningkatkan dana perimbangan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2019) menemukan hasil yang sebaliknya yaitu dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dana perimbangan yang cukup besar belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi cenderung digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai sehingga peningkatan dana perimbangan

tidak berpengaruh dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur dalam periode tahun 2010-2015.

Dana perimbangan merupakan dana yang dialokasikan APBN kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mencapai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah (Mustanir et al., 2023). Dana perimbangan juga bertujuan untuk pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar daerah melalui formula yang memperhatikan kebutuhan dan peluang daerah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa program penyaluran dana transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Maka dari itu, hasil ini mengonfirmasi *agency theory* bahwa pemerintah provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat sebagai *agent* yang berkewajiban untuk mengelola dana perimbangan sebaik mungkin yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat selaku *principal* yang salah satunya tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi telah dilakukan.

5. Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan H_5 didukung oleh data. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Anwar dkk (2018) yang menemukan hasil bahwa dana otonomi khusus memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa apabila dana otonomi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Selain itu, dana otonomi khusus juga memiliki dampak yang signifikan terhadap PDRB ADHB (Rahman, 2024). Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Mediyanti (2019) menemukan hasil yang sebaliknya yaitu dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi dimungkinkan karena pengambilan kebijakan dalam pengalokasian dana otsus terhadap anggaran belanja pemerintah yang tidak terfokus pada sektor-sektor perekonomian yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga meningkatnya dana otonomi khusus tidak diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil penelitian ini juga dimungkinkan dapat terjadi karena perbedaan lingkup objek penelitian sehingga mempengaruhi hasil yang diperoleh.

Dana otonomi khusus diberikan untuk tujuan membantu daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan insfrastuktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, kesehatan dan sosial. Dengan kata lain, dana otonomi khusus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Badan Keahlian DPR RI, 2020). Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa dana otonomi khusus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti

bahwa program dana otonomi khusus yang diberikan khusus bagi Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat memiliki pengaruh yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini mengonfirmasi konsep teori keagenan yang mana pemerintah daerah telah bertindak sebagai agen dalam mengelola dana otonomi khusus yang diperoleh oleh Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat selaku *principal*. Pemerintah daerah sebagai *agent* bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai *principal* yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya adalah dengan mengelola dana otonomi khusus secara optimal sesuai dengan tujuan awal diberikannya dana otonomi tersebut.

6. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan H_6 didukung oleh data. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mursyidah dkk., (2022), Alvaro (2022), Tobing (2019), Alvaro dan Prasetyo (2020), Ningsih dan Noviaty (2019), Wiraswasta dkk (2018), dan Anwar dkk (2018) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dengan tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya sebagai perwujudan desentralisasi. Apabila PAD yang diterima daerah semakin meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah

akan lebih banyak sehingga pemerintah daerah dapat menggali potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2019), Oktavia & Zulvia (2023) dan Ayana dkk., (2024) menemukan hasil yang sebaliknya yaitu PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak adanya relasi antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi dimungkinkan terjadi karena tidak adanya timbal balik yang seimbang antara tingkat penerimaan PAD dengan realisasi pemerintah dalam mendukung potensi masyarakat dengan membangun layanan publik yang dapat menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan *agency theory*, masyarakat sebagai *principal* memberikan kontribusi pada pendapatan daerah dengan membayar pajak, retribusi dan sebagainya yang nantinya akan dialokasikan oleh pemerintah daerah selaku agen sebagai bentuk tanggung jawab dan timbal balik kepada masyarakat (Fathia & Rusdi, 2020). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Dengan demikian maka penelitian ini mengonfirmasi teori keagenan dimana pemerintah daerah menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adanya pengaruh yang signifikan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi mampu memotivasi daerah untuk terus meningkatkan potensi daerah masing-masing karena dilihat dari data keuangan selama kurun waktu penelitian dari tahun 2010-2022 jumlah PAD

memiliki porsi yang paling sedikit dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pengeluaran daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat masih sangat bergantung dari dana tranfer pusat. Oleh sebab itu, peran pemerintah sebagai agen mempunyai kewajiban untuk terus menggali potensi daerah sangat diperlukan guna meningkatkan kemandirian daerah.

7. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan ekonomi

Penelitian ini menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan H_7 tidak didukung oleh data. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2019), Mursyidah dkk., (2022), dan Paudel (2023), bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meningkatnya alokasi belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Belanja modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah untuk sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebabkan oleh alokasi belanja modal yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasi selama kurun waktu penelitian yaitu tahun 2010-2022 sehingga mengakibatkan belanja modal tidak memberikan pengaruh yang

cukup berarti pada pertumbuhan ekonomi di pemerintah daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.

Belanja modal sering kali tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena beberapa faktor. Salah satu alasan utama adalah besarnya alokasi belanja modal yang terbatas dibandingkan dengan pengeluaran operasional lainnya, seperti belanja pegawai dan belanja rutin, yang lebih besar persentasenya. Hal ini menyebabkan belanja modal tidak dapat menggerakkan pembangunan infrastruktur secara optimal, yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, penggunaan belanja modal yang tidak efisien, misalnya proyek infrastruktur yang terlambat atau tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, mengurangi dampak positifnya. Keterlambatan dalam manfaat ekonomi dari belanja modal juga menjadi faktor penting, karena proyek infrastruktur membutuhkan waktu untuk memberikan dampak nyata, yang mungkin tidak terlihat dalam jangka pendek. Pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan moneter, iklim investasi, inflasi, dan kestabilan politik juga memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun ada peningkatan belanja modal, dampaknya terhadap ekonomi sering kali tertunda atau terhambat oleh faktor-faktor tersebut. Penelitian oleh Tobing (2019), Mursyidah dkk., (2022) dan Paudel (2023), mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak selalu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena pengalokasiannya yang terbatas dan penggunaan yang tidak efisien.

Dengan kata lain, meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tidak dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal. Di sisi lain, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2017) dan Abel dkk., (2019) yang menemukan hasil bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal terutama yang berkaitan dengan pengadaan infrastruktur, dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata. Penyebaran pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyebar sampai ke penjuru negeri. Perbedaan hasil penelitian ini dimungkinkan dapat terjadi karena perbedaan lingkup objek penelitian sehingga mempengaruhi hasil yang diperoleh.

Berdasarkan teori keagenan, peran pemerintah daerah (agen) dalam memaksimalkan anggaran belanja daerah dalam bentuk belanja modal merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Porsi belanja modal yang lebih besar akan berdampak pada peningkatan bidang sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah pada bidang fasilitas publik merupakan sektor pembentukan modal yang bisa meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat (Arlintang dkk, 2020). Hasil penelitian mengonfirmasi teori keagenan dimana pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah meskipun peningkatan tersebut belum maksimal dalam pelaksanaannya

dilihat dari jumlah alokasi belanja modal yang masih di bawah alokasi belanja operasional.

8. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak dapat memediasi hubungan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal (H_8) tidak didukung oleh data. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tobing (2019) yang menemukan hasil bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hal ini dimungkinkan karena dana perimbangan tidak sepenuhnya dipergunakan untuk membiayai keperluan belanja modal melainkan dipergunakan untuk keperluan belanja pegawai dan operasional lainnya sehingga tidak memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Selain itu, efisiensi pengelolaan keuangan daerah memainkan peran penting. Meskipun dana perimbangan tersedia, jika pengelolaannya tidak efisien, dampaknya terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi menjadi minimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dana perimbangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal, diperlukan perencanaan yang lebih baik dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat

daerah (Sinaga dkk., 2023). Di sisi lain, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiraswasta dkk., (2018) menemukan hasil bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hal ini terjadi karena pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat direalisasikan melalui belanja modal yang salah satu sumber pendanaannya dari dana perimbangan. Dengan demikian, semakin tingginya pelayanan dan pembangunan maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan semakin meningkat. Perbedaan hasil penelitian ini juga dimungkinkan dapat terjadi karena perbedaan lingkup objek penelitian sehingga mempengaruhi hasil yang diperoleh.

Sesuai dengan teori keagenan, pemerintah sebagai agen yang mempunyai kewajiban mengalokasikan dana perimbangan yang diperoleh untuk kepentingan publik sesuai dengan tujuan dari diberikannya dana perimbangan itu sendiri. Salah satu peran pemerintah dalam upaya memaksimalkan alokasi dana perimbangan adalah dengan membelanjakannya untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian masyarakat selaku principal dan nantinya diharapkan akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian mengonfirmasi teori keagenan dimana pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah meskipun peningkatan tersebut belum maksimal dalam pelaksanaannya dilihat dari peruntukan dana perimbangan yang sebagian besar masih digunakan untuk belanja

operasional sehingga hal ini pula tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

9. Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak dapat memediasi hubungan antara variabel dana otonomi khusus dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal (H_9) tidak didukung oleh data. Penelitian oleh Fahrizal dan Sukartini (2024) di Provinsi Aceh dan Basna dkk (2022) di Teluk Bintuni menemukan hasil bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pemerintah belum memaksimalkan penggunaan dana otonomi khusus pada alokasi belanja modal melainkan digunakan untuk alokasi belanja daerah yang lain seperti belanja operasi. Adapun belanja modal juga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2019), bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebabkan oleh alokasi belanja modal yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasi selama kurun waktu penelitian yaitu tahun 2010-2022 sehingga mengakibatkan belanja modal tidak memberikan pengaruh yang cukup berarti pada pertumbuhan ekonomi.

Di lain sisi, Jikwa dkk (2017), Wanma dkk (2021) dan Elwarin dkk (2021) menemukan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus (OTSUS) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Kontribusi sumber dana OTSUS terhadap pembangunan sektor khususnya belanja modal memiliki andil yang cukup signifikan. Walaupun dana otonomi khusus mampu memberikan pengaruh secara langsung terhadap belanja modal akan tetapi tidak dapat memberikan efek yang berarti pada pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Hal ini dimungkinkan karena porsi belanja modal yang relatif kecil dibandingkan dengan total belanja lainnya sehingga tidak signifikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola proyek-proyek pembangunan menyebabkan dana Otsus tidak dimanfaatkan secara efektif. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pengelolaan yang baik menjadi hambatan dalam realisasi belanja modal yang produktif (Fatahillah dkk., 2021). Penggunaan dana Otsus yang tidak efisien, termasuk adanya praktik korupsi dan penyimpangan, mengurangi dampak positif yang seharusnya dihasilkan dari belanja modal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak terdorong secara signifikan meskipun dana telah dialokasikan (Widodo, 2019).

Sebaliknya dana otonomi khusus mampu memberikan pengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa melalui belanja modal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar dkk (2018). Hal

ini bisa saja terjadi melalui penggunaan dana otonomi khusus untuk pengeluaran pada bidang lain yang mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil penelitian ini juga dimungkinkan dapat terjadi karena perbedaan lingkup objek penelitian sehingga mempengaruhi hasil yang diperoleh.

Sesuai dengan teori keagenan, pemerintah bertindak sebagai agen berkewajiban mengalokasikan dana otonomi khusus yang diperoleh daerah demi mendukung tujuan utama dari dana otonomi itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat (*principal*). Salah satunya adalah dengan mengalokasikannya pada belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang nantinya diharapkan dapat menunjang roda perekonomian masyarakat sebagai *principal*, kemudian akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian mengonfirmasi teori keagenan dimana pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah meskipun peningkatan tersebut belum maksimal dalam pelaksanaannya dilihat dari peruntukan dana otonomi khusus yang belum dimaksimalkan alokasinya pada belanja modal sehingga hal ini pula tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

10. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Penelitian ini menemukan bahwa belanja modal tidak dapat memediasi hubungan antara variabel PAD dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal (H_{10}) tidak didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2019) yang menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hal ini dimungkinkan karena jumlah Pendapatan Asli Daerah yang memiliki porsi paling kecil di antara sumber keuangan daerah yang lain sehingga tidak cukup untuk membiayai pengeluaran daerah khususnya belanja modal sehingga hal ini juga berdampak pada tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan dalam kapasitas pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan dapat menyebabkan PAD tidak dimanfaatkan secara optimal untuk investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Puspitasari dkk., 2023). Adapun beberapa daerah mungkin menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang menghambat kemampuan mereka untuk mengimplementasikan proyek belanja modal yang efektif, meskipun memiliki PAD (Mamuka dkk., 2019).

Sebaliknya Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Wiraswasta dkk., (2018) menemukan hasil yang sebaliknya yaitu dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hal ini terjadi karena pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat direalisasikan melalui belanja modal yang salah satu sumber pendanaannya dari dana perimbangan. Dengan demikian, semakin tingginya pelayanan dan pembangunan maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan semakin meningkat.

Sesuai dengan teori keagenan, peran pemerintah sebagai agen mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diperoleh untuk kepentingan publik sesuai dengan tujuan dari diberikannya dana perimbangan itu sendiri. Salah satu peran pemerintah dalam upaya memaksimalkan alokasi dana perimbangan adalah dengan membelanjakannya untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian masyarakat yang diharapkan nantinya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian mengonfirmasi teori keagenan dimana pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah meskipun peningkatan tersebut belum maksimal dalam pelaksanaannya dilihat dari peruntukan Pendapatan Asli Daerah yang belum dimaksimalkan alokasinya pada

belanja modal sehingga hal ini pula tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Kesimpulan
H ₁	Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal	Tidak didukung
H ₂	Dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal	Didukung
H ₃	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal	Tidak didukung
H ₄	Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	Didukung
H ₅	Dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	Didukung
H ₆	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	Didukung
H ₇	Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	Tidak didukung
H ₈	Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal	Tidak didukung
H ₉	Dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal	Tidak didukung
H ₁₀	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal	Tidak didukung

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian analisis dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
2. Dana perimbangan, dana otonomi khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

5.2 Implikasi Penelitian

Adapun implikasi yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat menambah sumber wawasan dan referensi bagi akademisi maupun mahasiswa sehubungan dengan sumber keuangan daerah dan perannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, terlihat dari porsi dana otonomi khusus yang memiliki jumlah paling besar diikuti dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mengindikasikan

bahwa Pemerintah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat belum mampu mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan mampu menggali lebih banyak potensi daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pengeluaran daerah agar tidak terus menerus bergantung pada dana transfer, karena dana transfer khususnya dana otonomi daerah tidak beriklan untuk jangka waktu selamanya. Pemerintah pusat diharapkan mampu memberikan pengawasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat dalam mengelola dana otonomi khusus guna tercapainya tujuan utama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan sedikit gambaran mengenai alokasi belanja modal yang masih sangat sedikit dibandingkan dengan alokasi belanja yang lain. Diharapkan pemerintah mampu memberikan perhatian lebih pada alokasi belanja modal untuk terus ditingkatkan karena melihat potensi yang dihasilkan dari belanja modal seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud dapat memberikan manfaat jangka panjang jika dimanfaatkan semaksimal mungkin dan pada akhirnya mampu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jangkauan penelitian ini terbatas pada daerah otonomi khusus di Indonesia sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain di Indonesia, termasuk daerah non-otonomi khusus.

Kedua, penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel lain yang mungkin memengaruhi alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, seperti kualitas tata kelola pemerintahan, tingkat pendidikan, infrastruktur, dan tingkat korupsi. Keterbatasan ini bisa mengurangi keakuratan hasil penelitian dalam menggambarkan hubungan yang sebenarnya antara variabel-variabel yang diteliti.

Ketiga, penelitian ini menggunakan data dalam rentang waktu tertentu tanpa mempertimbangkan pengaruh jangka panjang dari dana otonomi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh jangka panjang mungkin berbeda dari hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, sehingga studi yang lebih panjang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

5.4 Saran

Hasil penelitian ini belum konsisten dengan teori yang ada sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian tentang sumber keuangan daerah, alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan data dari daerah lain di Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas.

Penelitian lanjutan juga disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti kualitas tata kelola, tingkat pendidikan, dan infrastruktur dalam analisis untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah. Penelitian berikutnya juga dapat mengeksplorasi mekanisme bagaimana dana otonomi khusus dan belanja modal memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Gunawan, E., dan Karo-Karo, S. S. (2020). Pengaruh pajak bumi dan bangunan dan dana otonomi khusus terhadap belanja modal jaringan (bukti empiris dari Aceh). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4(1), 25–38.
- Abel, N.-A., K., B. V., dan B., A. P. (2019). Government capital expenditure, recurrent expenditure and economic growth in Ghana. *Ghanaian Journal of Economics*, 7(1), 44–70. <https://doi.org/10.10520/EJC-1b2f6ea97f>
- Alvaro, R. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal. *Jurnal Budget*, 7(2), 256–276.
- Alvaro, R., dan Prasetyo, A. (2020). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget*, 5(2), 103–120. <http://jeb.stieykpn.ac.id/index.php/jeb/article/view/35>
- Amin, F. (2019). *Penganggaran di pemerintah daerah: Dalam perspektif teoritis, normatif dan empiris*. UB Press.
- Anshori, M., dan Sri, I. (2017). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Airlangga University Press.
- Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., dan Hadi, S. (2018). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus dan belanja modal terhadap PDRB di kab/kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–13.
- Ariadi, W. (2021). *Manajemen belanja daerah dalam konsep dan analisis*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=e-hBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=belanja+operasional+belanja+modal+belanja+tidak+terduga+belanja+transfer+pertumbuhan+ekonomi&ots=Z7mGLk46GF&sig=mbVhEYHIE6j39HECYokgDtzz2Dg>
- Arlintang, N. O., Indrawati, L. R., dan Septiani, Y. (2020). Analisis pengaruh investasi, belanja modal, dan infrastruktur ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2018. *DINAMIC: Direcotry Journal of Economic*, 2(2), 573–586. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1390>
- Arvin, M. B., Pradhan, R. P., dan Nair, M. S. (2021). Are there links between institutional quality, government expenditure, tax revenue and economic growth? evidence from low-income and lower middle-income countries. In *Economic Analysis and Policy*, 70, 468–489. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.03.011>

- Ayana, I. D., Demissie, W. M., dan Sore, A. G. (2024). On the government revenue on economic growth of Sub-Saharan Africa: Does institutional quality matter? *Heliyon*, 10(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24319>
- Băhnăreanu, C. (2020). The economic impact of covid-19 pandemic at the beginning of 2020. *Carol I National Defence University Publishing House*, 11(75), 102–112.
- Bahri, Z., dan Aprilianti, V. (2023). *Menuju kesejahteraan berkelanjutan pemahaman terhadap pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, islam, green economy, dan blue economy*. Nas Media Pustaka.
- Basna, F. E., Salle, A., dan Lamba, R. S. A. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana otonomi khusus terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 5(2), 73–83.
- BI. (2020). *Bab 1- perkembangan ekonomi global - perkembangan ekonomi keuangan dan kerjasama internasional - Edisi III 2020*. 5–36. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/4.Bab-1__Perkembangan-Ekonomi-Global_III-2020.pdf
- Chasbiandani, T., Amyulianthy, R dan May, A. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, DBH, DAU, DAK terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.35814/jiap.v2i1.2555>
- Dailibas, Nasution, R., dan Suwanda, D. (2020). *Panduan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. CV Absolute Media.
- Divino, J. A., Maciel, D. T. G. N., dan Sosa, W. (2020). Government size, composition of public spending and economic growth in Brazil. *Economic Modelling*, 91, 155–166. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.06.001>
- Elwarin, L. F., Hasan, K., dan Tahir, M. A. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di kabupaten / kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2018. *The 2nd Widayagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2021)*, *Wnceb*, 455–464.
- Fahrizal, M. A., dan Sukartini, N. M. (2024). flypaper effect dana otonomi khusus dan dana perimbangan pada kabupaten/kota di Aceh. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(2), 1203–1214.
- Fatahillah, T. N., Prasetyia, F., dan Ananda, C. F. (2021). Dana otonomi khusus Papua, tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 345–359. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.429>

- Fathia, P. B., dan Rusdi, D. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3*. <http://arxiv.org/abs/1011.1669%0Ahttp://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Fitrah, M., dan Luthfiyah. (2017). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*. CV Jejak.
- Gujarati, D. N., dan Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics*. McGraw-Hill/Irwin.
- Handayani, T., Susetyo, D., dan Saleh, M. S. (2019). Pengaruh belanja modal, infrastruktur dan indeks pembangunan manusia terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 92–100. <https://doi.org/10.29259/jep.v15i2.8837>
- Hasudungan, A., Waskito, A. S. A., Banjaransari, A., Sanjaya, A., Ferlito, C., Pramudya, E. P., Gracelle, F., Matthew, J. A., Widjaja, N., Casadio, P., Ismail, R., Tanuwijaya, S. S., dan Kadarusman, Y. B. (2023). *Indonesia economic and business outlook 2023*. Prasetya Mulya Publishing.
- Herlin, F., Ratih, R., dan Hasan, B. (2021). *Keuangan daerah*. CV Azka Pustaka.
- Hidayat, W. (2017). *Perencanaan pembangunan daerah: pendekatan pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan dan kemiskinan di Jawa Timur*. UMM Press. <https://ummpress.umm.ac.id/buku/detail/perencanaan-pembangunan-daerah-pendekatan-pertumbuhan-ekonomi-disparitas-pendapatan-dan-kemiskinan>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian* (Cet.4). PT Rajagrafindo Persada.
- International Monetary Fund. (2023). *World economic outlook 2023: Navigating global divergences*. IMF.
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 335–341. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045>
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Jikwa, E., Salle, A., dan Layuk, P. K. A. (2017). Pengaruh pendapatan transfer dan silpa terhadap belanja modal di Kabupaten Mamberamo Tengah. *Jurnal Keuda*, 2(2), 1–15.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. UB Press.

- Krstic, K., Westerman, R., Chattu, V. K., V. Ekkert, N., dan Jakovljevic, M. (2020). Corona-triggered global macroeconomic crisis of the early 2020s. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), 9404. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249404>
- Lisandri, Rizani, F., dan Syam, A. Y. (2017). Pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread*, 7(2), 111–122.
- Mamuka, K. K., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 118–128.
- Mediyanti, S. (2019). Analisis dampak realisasi dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(1), 56–60. <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman>
- Muhyiddin, M., dan Nugroho, H. (2021). A year of Covid-19: A long road to recovery and acceleration of Indonesia's development. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181>
- Mursyidah, Sanusi, A., dan Harmono. (2022). Regional revenue and economic growth : through direct spending , empirical evidence from Indonesia. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 13(4), 36–48. <https://doi.org/10.9790/5933-1304063648>
- Mustanir, A., Salampessy, M., Sukriyadi, Yudianto, I., Islami, A. Y., Zulfachry, Yuliantoro, H. R., Amane, A. P. O., Nugraha, E., dan Fahmi, M. (2023). *Sistem Keuangan Pemerintah*. Global Eksekutif Teknologi.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., dan Fadillah, D. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintahan daerah kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., dan Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian bisnis : teknik dan analisa data dengan SPSS - STATA - EVIEWS*. Madenatera (Vol. 1). https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=T1nJQ0cAAAAJ&citation_for_view=T1nJQ0cAAAAJ:D03iK_w7-QYC
- Ningsih, E. K., dan Noviaty, D. E. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 91. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.67>

- Novelino, A. (2021). *DPR setuju RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2020*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210907141625-532-690877/dpr-setujui-ruu-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbn-2020>
- Oktavia, V., dan Zulvia, D. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 266–282.
- Pattinasarany, G. D. V., Haerudin, I., Irtanto, P. B., dan Iswanto, L. (2022). *Opsi keberlanjutan dana otonomi khusus 2022–2041: menuju tanah Papua yang sejahtera dan mandiri*. https://sikompak.bappenas.go.id/pustaka/view/10/id/2021_Opsi_Keberlanjutan_Dana_Otonomi_Khusus_2022-2041.pdf
- Paudel, R. C. (2023). Capital expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for Nepal. *Cogent Economics & Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2191449>
- Puspitasari, H., Khusaini, M., dan Pangesty, F. W. (2023). Analisis pendapatan daerah terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal kawasan Gerbangkertosusila. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 171–187. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i2.487>
- Rahayu, S., dan Yudi, R. (2022). *Audit dan auditor internal pemerintah*. Peneleh.
- Rahmadana, M. Bonaraja, P., Elidawaty, P., Ahmad, S., Nur, Z., Irdawati., Hengki., Mangiring, P. S., Eko, S., Edwin, B., dan Martha, A. C. K. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi: Pemikiran dan perkembangan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahman, S. (2024). Exploring fiscal decentralization in indonesia: the impact of special autonomy funds on the economies of Aceh, Papua, and West Papua. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 9(1), 118–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/j-3p.v9i1.4193>
- Rapanna, P., & Sukarno, Z. (2017). *Ekonomi pembangunan*. CV Sah Media.
- Rifkhan. (2022). *Membaca hasil regresi data panel*. Cipta Media Nusantara.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Sari, N., dan Djuanda, G. (2018). Pengaruh dana perimbangan, dana sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan pendapatan daerah terhadap belanja modal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 91–100.

- Selvanathan, E. A., Selvanathan, S., dan Jayasinghe, M. S. (2021). Revisiting Wagner's and Keynesian's propositions and the relationship between sectoral government expenditure and economic growth. *Economic Analysis and Policy*, 71, 355–370. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.05.005>
- Silviani, N. L. P. D., dan Adiputra, I. M. P. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal dengan budget ratcheting sebagai variabel moderasi (studi pada pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Bali). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 152–163.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduouse Media.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., dan Sofianti, N. A. (2017). *Keuangan di era otonomi daerah*. ANDI.
- Sulaiman, M. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*.
- Supriadi, I. (2020). *Metode riset akuntansi*. Deepublish Publisher.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di kabupaten/kota induk Provinsi Papua*. Deepublish.
- Tobing, K. I. U. . (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal serta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi (studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur). *Paradigma Accountancy*, 2(1), 39–51.
- Wanma, T. P., Hafizrianda, Y., dan Falah, S. (2021). Pengaruh Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus terhadap belanja modal di Papua Barat tahun 2014-2018. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 5(3). <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i3.1536>
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>
- Widodo, B. T. (2019). Evaluasi dinamis dampak fiskal otonomi khusus terhadap efisiensi layanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh tahun 2011-2017. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 31–53. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.463>

- Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., dan Adis, P. M. (2018). Pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di kota dalam wilayah Jawa Timur (tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2390>
- Wulandari, P. A., dan Emy, I. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.
- Yuliani, I. (2019). *Pengaruh belanja dan investasi terhadap kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yuliantoni, S., dan Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai variabel pemoderasi pada pemerintah provinsi se-Indonesia periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170–187. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.338>
- Zulkarnain, Z. I., dan Haryati, T. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 27–37. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i1.204>

LAMPIRAN

Data Penelitian (dalam juta)

No	Provinsi	Tahun	Dana Perimbangan	DOK	PAD	Belanja Modal	PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Aceh	2009	Rp1.570.603,95	Rp3.728.282,00	Rp735.205,79	Rp3.696.304,08	Rp32.219.086,32	-5,51
2		2010	Rp2.263.012,43	Rp3.849.806,84	Rp811.176,21	Rp3.267.911,39	Rp101.545.236,83	1,29
3		2011	Rp2.262.044,91	Rp4.510.656,50	Rp802.840,17	Rp1.473.983,45	Rp104.874.211,16	3,28
4		2012	Rp2.359.784,33	Rp5.476.288,76	Rp901.720,38	Rp815.338,78	Rp108.914.897,62	3,85
5		2013	Rp2.675.448,21	Rp6.222.785,78	Rp1.325.435,09	Rp1.650.120,55	Rp111.755.826,56	2,61
6		2014	Rp2.551.683,31	Rp6.824.386,51	Rp1.731.130,84	Rp2.407.479,41	Rp113.490.359,40	1,55
7		2015	Rp1.561.778,47	Rp7.057.756,97	Rp1.972.049,03	Rp2.025.103,49	Rp112.665.532,27	-0,73
8		2016	Rp1.572.466,63	Rp7.707.216,94	Rp2.060.180,95	Rp2.284.852,30	Rp116.374.299,89	3,29
9		2017	Rp3.802.879,50	Rp7.971.646,30	Rp2.276.305,57	Rp2.168.299,05	Rp121.240.978,72	4,18
10		2018	Rp3.735.791,72	Rp8.029.791,59	Rp2.359.385,39	Rp2.503.941,13	Rp126.824.365,24	4,61
11		2019	Rp4.279.088,34	Rp8.357.471,65	Rp2.698.912,47	Rp3.162.088,17	Rp132.069.570,80	4,14
12		2020	Rp3.885.903,19	Rp7.555.278,35	Rp2.570.775,88	Rp1.755.472,08	Rp131.580.967,16	-0,37
13		2021	Rp3.868.613,26	Rp7.555.827,81	Rp2.505.887,91	Rp2.199.333,37	Rp135.251.193,84	2,81
14		2022	Rp3.183.288,82	Rp7.560.000,00	Rp2.917.145,00	Rp2.868.705,76	Rp140.947.643,60	4,21
15		2023	Rp3.609.932,65	Rp3.960.000,00	Rp2.987.188,69	Rp1.676.030,00	Rp146.932.422,11	4,21
16	Papua	2009	Rp1.563.054,90	Rp2.609.797,40	Rp369.727,11	Rp1.199.489,10	Rp22.926.545,76	20,34

17		2010	Rp1.762.534,29	Rp3.494.864,79	Rp380.025,63	Rp1.404.550,46	Rp110.808.176,62	-4,48
18		2011	Rp1.893.484,85	Rp3.957.459,55	Rp363.100,75	Rp1.421.658,22	Rp106.066.723,39	-4,28
19		2012	Rp2.118.450,11	Rp3.833.402,14	Rp623.162,65	Rp1.309.177,87	Rp107.890.942,59	1,72
20		2013	Rp2.511.020,69	Rp4.355.950,05	Rp633.726,32	Rp1.220.744,85	Rp117.118.818,90	8,55
21		2014	Rp2.643.813,00	Rp4.777.070,56	Rp944.929,69	Rp1.689.302,79	Rp121.391.233,95	3,65
22		2015	Rp3.256.235,61	Rp7.190.429,88	Rp912.908,31	Rp2.865.461,76	Rp130.311.604,86	7,35
23		2016	Rp3.595.089,07	Rp7.382.551,86	Rp1.019.732,91	Rp2.490.333,44	Rp142.224.930,67	9,14
24		2017	Rp3.780.551,02	Rp8.205.152,41	Rp1.015.781,10	Rp2.328.012,67	Rp148.818.289,86	4,64
25		2018	Rp4.414.240,48	Rp8.020.854,12	Rp1.050.372,17	Rp1.918.505,43	Rp159.711.852,59	7,32
26		2019	Rp4.522.405,71	Rp8.674.676,70	Rp2.027.638,47	Rp2.236.551,42	Rp134.562.239,59	-15,74
27		2020	Rp3.637.609,42	Rp7.999.969,92	Rp1.388.510,06	Rp839.209,38	Rp137.677.571,32	2,39
28		2021	Rp3.807.733,37	Rp7.911.837,61	Rp2.139.689,48	Rp1.116.373,58	Rp158.611.039,00	15,11
29		2022	Rp5.004.746,24	Rp3.792.655,37	Rp2.226.754,65	Rp2.029.533,81	Rp172.907.287,88	8,97
30		2023	Rp1.393.688,55	Rp1.051.198,66	Rp770.916,17	Rp498.844,96	Rp181.926.534,45	5,22
31		2009	Rp1.030.362,65	Rp1.118.484,60	Rp73.617,90	Rp818.812,89	Rp28.221.352,20	32
32		2010	Rp1.462.347,94	Rp1.154.942,05	Rp125.853,34	Rp995.882,02	Rp41.361.671,92	46,56
33		2011	Rp1.483.865,43	Rp1.353.196,95	Rp152.163,91	Rp606.120,33	Rp42.867.187,12	3,64
34		2012	Rp1.516.156,70	Rp1.642.886,63	Rp175.450,13	Rp853.868,75	Rp44.423.335,15	3,63
35		2013	Rp2.992.755,35	Rp1.866.835,74	Rp236.282,89	Rp833.669,08	Rp47.694.234,96	7,36
36	Papua Barat	2014	Rp2.783.645,23	Rp2.047.315,95	Rp306.674,70	Rp1.191.788,08	Rp50.259.907,96	5,38
37		2015	Rp2.496.263,89	Rp2.867.327,09	Rp322.799,30	Rp1.677.004,07	Rp52.346.485,94	4,15
38		2016	Rp3.221.910,44	Rp3.174.665,08	Rp338.811,11	Rp1.446.543,65	Rp54.711.282,18	4,52
39		2017	Rp3.313.925,47	Rp3.266.493,89	Rp470.072,40	Rp770.102,98	Rp56.907.958,54	4,02
40		2018	Rp2.841.657,65	Rp4.008.937,48	Rp459.243,07	Rp1.539.271,67	Rp60.465.521,40	6,25
41		2019	Rp6.907.515,33	Rp3.947.794,96	Rp483.725,60	Rp1.757.983,37	Rp62.074.519,17	2,66

42	2020	Rp4.014.919,78	Rp4.001.479,43	Rp485.365,55	Rp1.543.170,85	Rp61.604.125,49	-0,76
43	2021	Rp2.826.148,76	Rp4.015.253,77	Rp483.953,90	Rp2.435.058,12	Rp61.289.399,91	-0,51
44	2022	Rp4.821.045,83	Rp2.306.842,71	Rp620.226,53	Rp2.198.753,60	Rp62.518.525,55	2,01
45	2023	Rp2.677.345,72	Rp1.011.942,25	Rp570.268,53	Rp1.046.163,33	Rp40.954.860,84	5,18

Hasil Olah Data

Uji Substruktural I

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.092049	(2,39)	0.0567
Cross-section Chi-square	6.623260	2	0.0365

Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.155314 (0.6935)	0.270451 (0.6030)	0.425765 (0.5141)

Uji Sub Struktural II

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.195708	(2,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	29.002570	2	0.0000

Uji Multikolinearitas substruktural I dan II

	X1	X2	X3	Y1
X1	1.000000	0.420503	0.268097	0.277156
X2	0.420503	1.000000	0.629016	0.556794
X3	0.268097	0.629016	1.000000	0.392069
Y1	0.277156	0.556794	0.392069	1.000000

Uji Heteroskedastisitas substruktural I

Dependent Variable: ABS(RESID)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/14/24 Time: 14:43
 Sample: 2009 2023
 Periods included: 15
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	458858.5	215940.1	2.124934	0.0397
X1	-0.026922	0.069813	-0.385625	0.7018
X2	0.021308	0.041788	0.509906	0.6129
X3	-0.041260	0.102249	-0.403529	0.6887

Uji Heteroskedastisitas substruktural II

Dependent Variable: ABS(RESID)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/14/24 Time: 14:47
 Sample: 2009 2023
 Periods included: 15
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25952748	7592185.	3.418350	0.0015
X1	1.112129	2.363953	0.470453	0.6407
X2	-5.295248	1.532733	-3.454776	0.0014
X3	1.445849	3.403991	0.424751	0.6734
Y1	3.952875	3.546364	1.114627	0.2720

Perbaikan Uji Heteroskedastisitas substruktural II

Dependent Variable: Y2
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 11/14/24 Time: 14:51
 Sample: 2009 2023
 Periods included: 15
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 45
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	60091723	7913031.	7.594021	0.0000
X1	4.074054	1.964269	2.074082	0.0449
X2	3.819733	1.853757	2.060536	0.0462
X3	15.68093	4.601769	3.407587	0.0016
Y1	-5.899294	3.385311	-1.742615	0.0895

Uji hipotesis

Sub struktural I

Uji t

Dependent Variable: Y1
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/14/24 Time: 14:49
 Sample: 2009 2023
 Periods included: 15
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	787533.2	291984.8	2.697172	0.0101
X1	0.034435	0.094398	0.364782	0.7171
X2	0.157346	0.056504	2.784668	0.0081
X3	0.057312	0.138257	0.414532	0.6806

Substruktural II

Uji t

Dependent Variable: Y2
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 11/14/24 Time: 14:51
 Sample: 2009 2023
 Periods included: 15
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 45
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	60091723	7913031.	7.594021	0.0000
X1	4.074054	1.964269	2.074082	0.0449
X2	3.819733	1.853757	2.060536	0.0462
X3	15.68093	4.601769	3.407587	0.0016
Y1	-5.899294	3.385311	-1.742615	0.0895

Uji f dan koefisien determinasi

R-squared	0.894532
Adjusted R-squared	0.877879
S.E. of regression	20629105
F-statistic	53.71628
Prob(F-statistic)	0.000000